

TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
BUDAYA LOKAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE,
INFORMATION TECHNOLOGY UTILIZATION, AND
GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE
FINANCIAL CONDITION OF LOCAL GOVERNMENTS WITH
LOCAL CULTURE AS A MODERATING VARIABLE***

SHARASWATI

A062232033



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
BUDAYA LOKAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE,
INFORMATION TECHNOLOGY UTILIZATION, AND
GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE
FINANCIAL CONDITION OF LOCAL GOVERNMENTS WITH
LOCAL CULTURE AS A MODERATING VARIABLE***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister disusun dan
diajukan oleh

SHARASWATI

A062232033



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun dan diajukan oleh:

SHARASWATI
A062232033

Telah dipertahankan di hadapan tim penilai ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin pada tanggal, **17 April 2026**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196511271991032001

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Svamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001



Prof. Dr. Mursahim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 19710619 200003 1001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sharaswati

NIM : A062232033

Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

"PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI"

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



SHARASWATI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Proses penyusunan penelitian ini merupakan rangkaian panjang yang menuntut ketekunan, kesabaran, serta komitmen yang tinggi, sehingga keberhasilannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Nirwana, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku dosen pembimbing, atas kesediaan beliau meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga. Pandangan akademik, ketelitian, serta kritik konstruktif yang beliau berikan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat landasan teoritis dan metodologis penelitian ini, sehingga dapat disusun secara lebih sistematis dan ilmiah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. Haliah, S.E., Ak., M.Si., CA. dan Prof. Dr. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku tim penguji, atas kritik yang membangun, saran yang objektif, serta kontribusi pemikiran yang sangat berharga. Masukan yang disampaikan oleh beliau sangat membantu penulis dalam memperbaiki struktur penulisan, memperjelas analisis, serta meningkatkan ketepatan penyajian hasil penelitian, sehingga kualitas karya ilmiah ini menjadi lebih baik.

Selanjutnya, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa yang tulus, kasih sayang yang tak terhingga, serta dukungan moral dan spiritual yang tidak pernah terputus. Doa dan pengorbanan orang tua menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik, sekaligus menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan studi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Program Magister Akuntansi yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, motivasi, serta semangat selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan penelitian. Diskusi, kerja sama, serta saling berbagi pengalaman akademik menjadi bagian berharga yang turut memperkaya perjalanan studi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Makassar, 17 April 2026

Sharaswati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Teori <i>Stakeholder</i>	12
2.1.2 <i>DeLone and McLean Information Success Model</i>	14
2.1.3 Kondisi Keuangan.....	16
2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	19
2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	21
2.1.6 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	22
2.1.7 Budaya Lokal.....	25
2.2 Tinjauan Empiris.....	29
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	30
3.1 Kerangka Konseptual	30
3.2 Hipotesis.....	32

BAB IV METODE PENELITIAN	40
4.1 Rancangan Penelitian.....	40
4.2 Situs dan Waktu Penelitian.....	40
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	40
4.4 Jenis dan Sumber Data	42
4.5 Metode Pengumpulan Data	43
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
4.7 Instrumen Penelitian.....	49
4.8 Teknik Analisis Data	49
 BAB V HASIL PENELITIAN	 54
5.1 Deskripsi Data	54
5.2 Uji Instrument	57
5.3 Uji Asumsi Klasik.....	63
5.4 Analisis Statistik Deskriptif.....	67
5.5 Uji Hipotesis	77
 BAB VI PEMBAHASAN	 87
 BAB VII PENUTUP	 103
 DAFTAR PUSTAKA.....	 109
 LAMPIRAN	 113

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1	Operasionalisasi Variabel.....	47
Tabel 5.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	55
Tabel 5.2	Karakteristik Responden.....	56
Tabel 5.3	Hasil Uji Validitas X1.....	58
Tabel 5.4	Hasil Uji Validitas X2.....	58
Tabel 5.5	Hasil Uji Validitas X3.....	59
Tabel 5.6	Hasil Uji Validitas Y.....	60
Tabel 5.7	Hasil Uji Validitas Z.....	61
Tabel 5.8	Hasil Uji Reliabilitas.....	63
Tabel 5.9	Hasil Uji Normalitas.....	64
Tabel 5.10	Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel 5.11	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	66
Tabel 5.12	Statistik Deskriptif X1.....	68
Tabel 5.13	Statistik Deskriptif X2.....	70
Tabel 5.14	Statistik Deskriptif X3.....	71
Tabel 5.15	Statistik Deskriptif Y.....	73
Tabel 5.16	Statistik Deskriptif Z.....	76
Tabel 5.17	Uji Summary.....	77
Tabel 5.18	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	78
Tabel 5.19	Uji Summary MRA.....	82
Tabel 5.20	Hasil Analisis Regresi Moderasi.....	83
Tabel 5.21	Hasil Penelitian.....	86

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Trend Kondisi Keuangan Daerah.....	2
Gambar 3.1	Kerangka Konseptual.....	32

ABSTRAK

SHARASWATI. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kondisi keuangan daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi (dibimbing oleh Nirwana).

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berperan dalam meningkatkan kondisi keuangan daerah, tetapi bagaimana pengaruhnya setelah ditambahkan budaya lokal masih belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kondisi keuangan daerah serta menguji budaya lokal sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan daerah. Selain itu, budaya lokal terbukti secara konsisten memperkuat pengaruh ketiga variabel tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang optimal membutuhkan sinergi aspek teknis, kompetensi aparatur, sistem pengendalian, serta internalisasi nilai budaya lokal.

Kata kunci: Kompetensi sumber daya manusia; teknologi informasi; sistem pengendalian intern pemerintah; budaya lokal; kondisi keuangan daerah

ABSTRACT

SHARASWATI. The influence of human resource competence, information technology utilization, and government internal control systems on the financial condition of local governments with local culture as a moderating variable (supervised by Nirwana).

Many studies have shown that human resource competency, information technology utilization, and government internal control systems play a role in improving regional financial conditions, but their impact after the addition of local culture remains largely unexplored. This study aims to analyze the influence of human resource competency, information technology utilization, and government internal control systems on regional financial conditions and to examine local culture as a moderating variable. The study used a quantitative approach with data collection through questionnaires. Data analysis was conducted using multiple linear regression and moderated regression analysis. The results show that human resource competency, information technology utilization, and government internal control systems have a positive and significant impact on regional financial conditions. Furthermore, local culture has been consistently proven to strengthen the influence of these three variables. These findings confirm that optimal regional financial management requires synergy between technical aspects, apparatus competency, control systems, and the internalization of local cultural values.

Keywords: Human resource competence; information technology; government internal control system; local culture; regional financial condition

BAB I

PENDAHULUAN

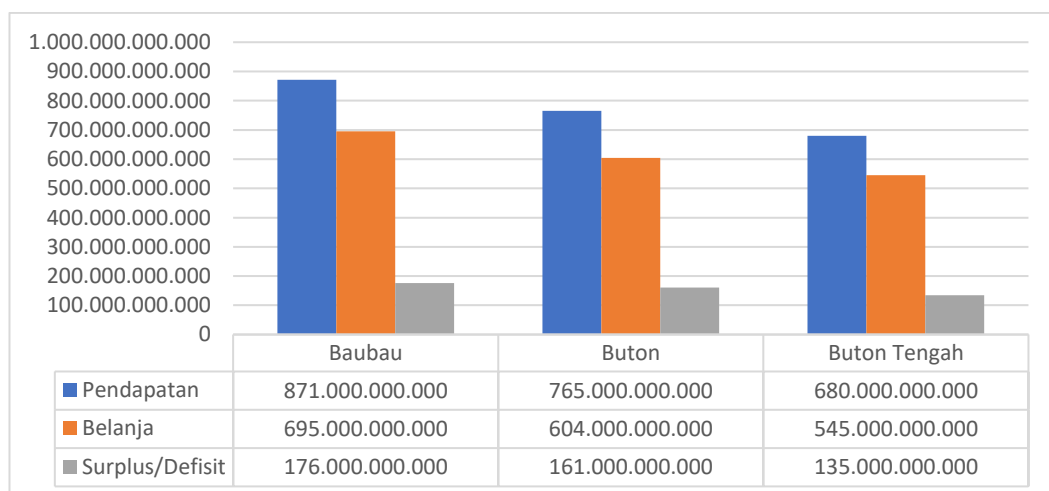
1.1 Latar Belakang

Kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan indikator fundamental dalam menilai keberhasilan pengelolaan fiskal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan mengelola belanja secara optimal, tetapi juga memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Menurut Nirwana (2015), kondisi keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, menjaga keseimbangan anggaran, menyediakan pelayanan publik secara memadai, serta mengantisipasi risiko fiskal yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Ritonga (2015) menyatakan bahwa kondisi keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban finansial, mengantisipasi kejadian tak terduga, serta mengeksekusi hak-hak keuangan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kondisi keuangan tidak hanya diukur dari surplus atau defisit anggaran, tetapi juga dari kapasitas manajerial dan tata kelola yang mendukung stabilitas fiskal secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Teori *Stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (2010), organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada satu kelompok kepentingan, melainkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dipengaruhi atau mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Dalam konteks pemerintah daerah, *stakeholder* mencakup masyarakat, DPRD, pemerintah pusat, aparatur sipil negara, lembaga pengawas, kreditor, media, serta kelompok masyarakat sipil lainnya. Pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya

publik memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menciptakan nilai bagi seluruh *stakeholder* melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi keuangan yang baik menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus sarana komunikasi utama antara pemerintah daerah dan para *stakeholder*.

Fakta yang terjadi di Kepulauan Buton memperlihatkan dinamika menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kondisi keuangan di wilayah Pulau Buton yang khususnya terdiri dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah mengalami kondisi yang berbeda-beda, seperti dapat terlihat pada gambar diagram dibawah ini.



Gambar 1.1 Tren Kondisi Keuangan 2024

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2024, kondisi keuangan daerah di Pulau Buton menunjukkan adanya perbedaan antar wilayah, yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah. Kota Baubau memiliki pendapatan daerah tertinggi sebesar Rp871 miliar dengan belanja daerah sebesar Rp695 miliar, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp176 miliar. Kabupaten Buton mencatat pendapatan sebesar Rp765

miliar dan belanja sebesar Rp604 miliar dengan surplus anggaran Rp161 miliar, sedangkan Kabupaten Buton Tengah memiliki pendapatan dan belanja yang relatif lebih rendah, yaitu pendapatan sebesar Rp680 miliar dan belanja Rp545 miliar, dengan surplus anggaran sebesar Rp135 miliar.

Fenomena empiris di wilayah Pulau Buton ini menunjukkan adanya variasi kondisi keuangan antar daerah meskipun ketiganya sama-sama mencatatkan surplus anggaran. Perbedaan besaran pendapatan, belanja, dan surplus antara Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah mengindikasikan bahwa surplus anggaran tidak selalu mencerminkan kinerja keuangan daerah yang baik. Namun, kondisi ini juga dapat terjadi akibat rendahnya penyerapan anggaran, perencanaan yang kurang optimal, serta keterbatasan kapasitas aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan (Sukmaningtyas, 2017). Ketika anggaran yang telah dialokasikan tidak terealisasi secara maksimal, maka akan muncul selisih lebih antara pendapatan dan belanja. Oleh karena itu, capaian surplus tidak selalu identik dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, melainkan dapat mengindikasikan adanya program yang belum terlaksana secara optimal.

Lebih lanjut, berdasarkan perspektif teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (2010), keberhasilan fiskal tidak hanya diukur dari keseimbangan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan melalui pelayanan publik yang efektif, penggunaan sumber daya yang efisien, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek administratif dan keseimbangan antara pendapatan dan belanja,

tetapi juga terhadap kualitas pelayanan publik serta manfaat yang dirasakan secara luas oleh para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan perspektif tersebut, penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah sebelumnya telah dilakukan oleh Nirwana (2015) dengan menitikberatkan pada aspek fiskal dan modal organisasi sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modal sumber daya manusia tidak secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan, melainkan melalui modal budaya. Temuan ini mengisyaratkan bahwa faktor internal organisasi dan konteks sosial budaya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kondisi keuangan daerah. Namun demikian, penelitian terdahulu ini belum menguji secara simultan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kondisi keuangan dengan menempatkan budaya lokal sebagai variabel moderasi dalam kerangka teori *stakeholder*. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan menempatkan budaya lokal sebagai variabel moderasi. Dalam kerangka ini, kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Djoko dan Andri (2022) menjelaskan bahwa kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memungkinkan individu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai akan mampu menyusun anggaran secara realistis, melaksanakan program sesuai

ketentuan, serta menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sebaliknya, rendahnya kompetensi dapat mengakibatkan lemahnya perencanaan, ketidaktepatan pelaksanaan program, serta rendahnya kualitas pelaporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi keuangan daerah secara keseluruhan.

Selain kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi elemen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang modern dan akuntabel. Andriani et al., (2020) menyatakan bahwa teknologi informasi berperan dalam meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi pengelolaan data keuangan. Sistem informasi keuangan yang dimanfaatkan secara optimal dapat memperkuat proses pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi laporan keuangan, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

Di sisi lain, efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menjamin akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. SPIP merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh elemen organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pemerintahan. Welly (2021) menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar prosedur administratif, melainkan harus terintegrasi dalam setiap proses kerja dan pengambilan keputusan. Apabila pengendalian intern tidak berjalan secara optimal, maka risiko kesalahan dan penyimpangan akan semakin meningkat, sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah.

Namun demikian, efektivitas kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP dalam mempengaruhi kondisi keuangan tidak dapat dilepaskan dari peran budaya lokal yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat dan birokrasi daerah. Budaya lokal tidak hanya membentuk pola perilaku individu, tetapi juga mempengaruhi etos kerja, tata kelola, serta pola interaksi dalam organisasi. Dalam konteks masyarakat Buton, falsafah Bhinci-Bhinciki Kuli yang mencakup nilai Pomae-maeka (saling menghormati), Popia-piara (saling memelihara), Pomaa-Maasiaka (saling menyayangi), dan Poangka-angkataka (saling menghargai) menjadi prinsip moral yang memperkuat sikap disiplin, akuntabilitas, dan solidaritas aparatur (Mutawally, 2023). Oleh karena itu, dalam penelitian ini budaya lokal diposisikan sebagai variabel moderasi yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Budaya lokal yang kuat dapat mendorong terciptanya sistem kerja yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan lemahnya internalisasi nilai budaya dapat memicu ketidakdisiplinan dan penyimpangan prosedur.

Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Nirwana (2015) terletak pada integrasi teori *stakeholder* sebagai landasan konseptual utama dalam menjelaskan hubungan antarvariabel, pengujian secara simultan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, serta penempatan budaya lokal sebagai variabel moderasi dalam konteks spesifik wilayah Pulau Buton.

Dengan demikian, berdasarkan kesenjangan penelitian dan pentingnya memahami interaksi antara faktor internal organisasi dan nilai budaya lokal, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi

keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Budaya Lokal sebagai Variabel Moderasi.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi?
6. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat membantu dalam memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu akuntansi sektor publik.
2. Dapat memberikan tambahan informasi dan memberikan sumbangan konseptual khususnya mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah, dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan budaya lokal.
2. Bagi akademik, penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pulau Buton, khususnya di Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Tengah, dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis kondisi keuangan dan beberapa variabel yang mempengaruhinya yakni kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah dengan menempatkan budaya lokal sebagai variabel moderasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berisi tinjauan secara umum mengenai perencanaan penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan teori dan konsep yang digunakan serta tinjauan empiris. Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar acuan dalam proses melakukan penelitian. Peneliti mengkajinya dari berbagai

sumber sehubungan dengan judul sehingga menghasilkan hipotesis dan digambarkan dikerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis, menguraikan kerangka konseptual dan proses penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan mekanisme pembentukan hipotesis berdasarkan judul penelitian.

Bab IV Metode Penelitian, menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data. Bab ini menjelaskan teknik pengolahan data sampai pada penggunaan alat analisis yang digunakan peneliti.

Bab V Hasil Penelitian, menguraikan hasil pengolahan dan analisis data yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan. Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi karakteristik responden, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, serta hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis. Penyajian hasil dilakukan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk memberikan gambaran empiris mengenai variabel-variabel penelitian.

Bab VI Pembahasan, menguraikan interpretasi dan analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh pada bab sebelumnya. Bab ini membahas keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori yang digunakan, serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Pembahasan dilakukan untuk menjelaskan makna temuan penelitian, mengidentifikasi kesesuaian atau perbedaan dengan teori dan penelitian sebelumnya, serta menjelaskan implikasi hasil penelitian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Bab VII Penutup, merupakan bagian akhir penelitian yang memuat simpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran. Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Implikasi penelitian menjelaskan kontribusi teoritis dalam memperkuat pengembangan teori stakeholder serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Selain itu, bab ini menguraikan keterbatasan penelitian yang berkaitan dengan ruang lingkup, variabel, dan metode yang digunakan, serta menyampaikan saran bagi pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya guna mendukung pengembangan penelitian di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Stakeholder adalah pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi (menerima dampak) oleh keputusan yang diambil atau dapat pula didefinisikan sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan (Kusumedi and Rizal Hb 2010). Menurut Fontaine et al., (2006) teori *stakeholder* merupakan manajemen organisasi yang diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*.

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu pimpinan organisasi memahami lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara hubungan yang ada di lingkungan organisasi mereka. Namun, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu pimpinan organisasi meningkatkan nilai dari aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh aktivitas tersebut. Faktanya, inti dari teori *stakeholder* terletak pada hasil hubungan antara organisasi dan *stakeholder* (charles fontaine and stefan schmid 2006).

Teori *stakeholder* merupakan suatu pendekatan dalam teori organisasi dan manajemen yang menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh kegiatan suatu organisasi, termasuk entitas publik seperti pemerintah daerah. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman (2010) dalam bukunya yang berjudul *Strategic Management:*

A Stakeholder Approach, di mana ia mengemukakan bahwa sebuah organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*) saja, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), seperti masyarakat, pegawai, pemerintah, kreditor, dan lainnya. Dalam konteks sektor publik, termasuk pemerintah daerah, *stakeholder* dapat mencakup warga masyarakat, lembaga legislatif daerah (DPRD), organisasi masyarakat sipil, media massa, aparatur sipil negara, dan investor.

Dalam praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah, teori *stakeholder* menjadi sangat relevan karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan melaporkan anggaran yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga harus memastikan akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Teori *stakeholder* memberikan dasar konseptual untuk memahami bahwa kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian target kinerja internal birokrasi, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan publik yang luas.

Lebih jauh, kondisi laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana aspirasi dan tekanan dari para *stakeholder* diakomodasi. Kondisi laporan keuangan adalah cara paling efisien bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan kelompok *stakeholder* yang dianggap memiliki ketertarikan dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari sebuah organisasi (Nirwana 2015). Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang terkadang saling bertentangan agar tidak terjadi ketimpangan dalam alokasi sumber daya keuangan daerah. Teori

stakeholder juga membantu menjelaskan mengapa penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* agar dapat menciptakan kepercayaan dan meningkatkan legitimasi sosial pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam literatur akademik, hubungan antara teori *stakeholder* dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga disampaikan oleh Mardiasmo (2009) dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik* yang menyebutkan bahwa keterlibatan *stakeholder* dalam proses anggaran daerah dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berkeadilan. Hal ini memperkuat argumen bahwa teori *stakeholder* bukan hanya sebagai pendekatan normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam menilai bagaimana pengelolaan keuangan sehingga akan tercermin dalam kondisi keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan.

2.1.2 *DeLone and McLean Information Success Model*

DeLone and McLean Information Success Model merupakan sebuah model yang diusulkan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean pada tahun 1992, dan telah mengalami penyempurnaan pada tahun 2003 untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang berfokus pada kesuksesan implementasi sebuah sistem berdasarkan pada hubungan dari variabel-variabel pengukuran kesuksesan sistem (Khairunnisa & Yunanto, 2017).

Model ini berfungsi sebagai alat bantu yang komprehensif dalam menilai sejauh mana suatu sistem informasi mampu memberikan nilai tambah bagi pengguna maupun organisasi yang mengadopsinya. Dalam model revisi tahun 2003, mengemukakan enam dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu kualitas

sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan atau niat untuk menggunakan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih (Rulinawaty et al., 2024).

1. Kualitas sistem (*system quality*), mengukur seberapa andal, mudah digunakan, fleksibel, dan cepat sistem informasi dalam merespons kebutuhan pengguna. Dalam konteks pemerintah daerah, kualitas sistem yang baik sangat penting untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dan pelaporan keuangan.
2. Kualitas informasi (*information quality*), digunakan untuk menilai akurasi, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu dari informasi yang dihasilkan oleh sistem. Pemerintah daerah memerlukan informasi berkualitas agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akuntabel.
3. Kualitas layanan (*service quality*), menunjukkan mutu layanan dari penyedia sistem, termasuk ketersediaan bantuan teknis, kecepatan tanggapan, dan kemampuan teknis petugas. Karena banyak aparatur sipil negara tidak berlatar belakang teknologi, dukungan teknis yang responsif sangat dibutuhkan dalam penggunaan sistem informasi.
4. Tingkat penggunaan (*intention to use*), menggambarkan sejauh mana sistem informasi digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh pengguna. Tingginya tingkat penggunaan mencerminkan bahwa sistem tersebut benar-benar mendukung efektivitas kerja di lingkungan pemerintah daerah.
5. Kepuasan pengguna (*user satisfaction*), mencerminkan kepuasan pengguna terhadap sistem berdasarkan pengalaman penggunaan, kemudahan, dan manfaat yang dirasakan. Kepuasan ini dapat meningkatkan komitmen untuk terus menggunakan sistem dalam jangka panjang.

6. Manfaat bersih (*net benefits*), mengukur dampak positif dari penggunaan sistem terhadap kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Di pemerintah daerah, manfaat ini dapat berupa efisiensi kerja, kemudahan akses informasi, peningkatan transparansi layanan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2.1.3 Kondisi Keuangan

Teori kondisi keuangan berkaitan dengan probabilitas pemerintah dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan (Beme, 1992). Rivenbark et al., (2009) menjelaskan juga bahwa kondisi keuangan mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya secara efektif agar dapat memenuhi kewajiban keuangan, mempertahankan pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ritonga (2015) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien.

Kondisi keuangan menurut Nirwana (2015) menyatakan bahwa kondisi keuangan diartikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, menyediakan layanan publik, serta memenuhi kewajiban keuangan yang dimilikinya. Ketiga aspek tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, kualitas alokasi sumber daya baik berupa keuangan, aset fisik, maupun sumber daya manusia menjadi determinan utama dalam menciptakan stabilitas fiskal dan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Alokasi yang tepat

sasaran tidak hanya memungkinkan pemerintah melaksanakan fungsi pelayanan publik secara optimal, tetapi juga memperkuat kapasitasnya dalam memenuhi tanggung jawab keuangan dan mempertahankan kepercayaan publik.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kondisi keuangan yang baik tercermin dari kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga keseimbangan anggaran tahunan, serta memenuhi tanggung jawab keuangan jangka panjang. Selain itu, kondisi keuangan yang sehat juga menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, kondisi keuangan tidak hanya menggambarkan situasi fiskal saat ini, tetapi juga menjadi tolok ukur atas kesiapan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas keuangan dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Kondisi keuangan menurut Dinapoli (2011), menyatakan bahwa kondisi keuangan ditentukan oleh gabungan antara lingkungan pemerintahan, faktor kelembagaan, dan faktor keuangan.

1. Lingkungan pemerintahan

Lingkungan pemerintah diartikan sebagai arena kerangka kerja legislatif dalam pembagian peran dan tanggung jawab di bidang pemerintahan. Lingkungan pemerintahan mengacu pada kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Lingkungan ini berada diluar kendali

langsung pemerintah daerah tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan daerah. Dinapoli (2011) menyatakan faktor lingkungan mencakup langkah-langkah kebutuhan dan sumber daya masyarakat seperti jumlah penduduk, nilai properti dan kemiskinan, serta faktor ekonomi seperti inflasi, pendapatan individu dan pengangguran.

2. Faktor kelembagaan

Faktor kelembagaan adalah praktik manajemen yang sehat dan adanya kebijakan atau peraturan pemerintah daerah yang menjamin terlaksananya pengelolaan pemerintahan yang sehat. Kelembagaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan pemerintahan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Indikator faktor kelembagaan menurut Dinapoli (2011) yang membentuk kondisi keuangan pemerintah daerah terdiri atas ketersediaan anggaran, ketepatan waktu dan akurasi transaksi keuangan, serta kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Faktor keuangan

Faktor keuangan adalah distribusi keuangan yang dijalankan oleh sistem keuangan. Faktor keuangan berkaitan dengan keberlangsungan dan stabilitas keuangan pemerintah daerah dalam mengelola berbagai aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan utang secara efektif sehingga dapat mendukung pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan faktor keuangan yang baik mencerminkan pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya, menjaga keseimbangan fiskal, dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Indikator faktor keuangan menurut Dinapoli (2011) terdiri atas balasan hutang, potensi pajak, dan legalitas pengeluaran.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia menurut Gasperz (2019) didefinisikan sebagai keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan karakteristik lain yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Kompetensi ini sebagai karakter dasar seseorang yang memiliki indikasi cara berperilaku atau berpikir pada cakupan situasi yang luas dan bertahan untuk waktu yang lama. Menurut Djoko Setyo & Andri Yandi (2022) kompetensi dapat dikatakan sebagai perilaku dasar yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi, dan pengetahuan atau keahlian yang dimiliki seseorang dengan kinerja yang tinggi pada tempat kerjanya. Kompetensi sumber daya manusia didefinisikan juga sebagai kemampuan individu, organisasi (kelembagaan), atau sistem untuk melakukan tanggung jawabnya dengan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan (Amanda et al., 2024).

Kompetensi sumber daya manusia Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013, merujuk pada standar kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Dari pembahasan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Kompetensi sumber daya manusia menurut Gasperz (2019) memiliki tiga indikator yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Pengetahuan ini bisa diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, atau pelatihan, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian tugas.

2. Keterampilan (*skills*)

Keterampilan mencerminkan kemampuan seseorang dalam melakukan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Keterampilan dapat berkembang melalui latihan dan pengalaman, serta berperan penting dalam efektivitas kerja.

3. Perilaku (*attitude*)

Sikap berkaitan dengan nilai dan gambaran diri seseorang. Sikap mempengaruhi bagaimana individu memandang dirinya sendiri dan bagaimana hal tersebut berdampak pada perilaku dalam pekerjaan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen paling krusial dalam organisasi, karena kualitas dan kapasitas manusia sangat menentukan arah, keberhasilan, serta keberlanjutan suatu institusi atau organisasi. Pembangunan SDM yang unggul tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan pendekatan yang terstruktur, berkesinambungan, dan menyeluruh (Masnawati 2015). Pengembangan kompetensi pegawai merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 huruf b. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pembimbingan bagi para pegawainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pegawai dalam mempertahankan dan meningkatkan

kemampuan kerja yang mereka miliki. Kegiatan pelatihan ini tidak boleh bersifat sekali saja, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam sektor pemerintahan daerah.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung aktivitas operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Teknologi informasi mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta jaringan dan sistem komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data secara efisien (Heinrich and Probohudono 2023). Komala et al., (2023) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Warsita (2018) yang mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasi, serta menggunakan data secara bermakna.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, menurut Andriani et al., (2020) pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan teknologi secara optimal baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengguna dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Pemanfaatan teknologi informasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini,

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan serta menggunakan teknologi informasi guna memperlancar proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data keuangan secara elektronik.

DeLone and McLean Information Success Model memiliki tingkat relevansi yang tinggi dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah dituntut untuk mengimplementasikan prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Model ini berperan sebagai kerangka evaluatif yang menyeluruh untuk mengukur sejauh mana sistem informasi dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunaannya maupun bagi organisasi yang menerapkannya. Dalam versi penyempurnaan tahun 2003, model ini mengidentifikasi enam dimensi kunci yang saling terhubung, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat penggunaan atau niat untuk menggunakan, kepuasan pengguna, serta manfaat bersih yang diperoleh (Rulinawatya et al., 2024).

2.1.6 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh pimpinan serta seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, konsep tersebut diadopsi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah bentuk pengendalian internal yang secara khusus diterapkan di lingkungan instansi

pemerintah, baik di Tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah didefinisikan sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPIP bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi agar tetap aman dan terkelola dengan baik, memastikan ketelitian dan keandalan data akuntansi yang digunakan dalam proses pelaporan, mendorong efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Welly 2021).

Sistem pengendalian intern pemerintah menurut Ferlia et al., (2023) merupakan suatu sistem yang mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dirancang dan dikoordinasikan secara menyeluruh guna mendukung terciptanya tata Kelola organisasi yang efektif dan akuntabel. Indriani dan Siswanto (2023) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan yang masuk akal atas pencapaian tujuan organisasi. Unsur-unsur SPIP menurut Fadil Asri et al., (2023) terdiri dari lima unsur yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui.

Unsur lingkungan pengendalian terdiri atas: (a) penegakkan integritas dan nilai etika; (b) komitmen terhadap kompetensi; (c) kepemimpinan yang kondusif; (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; (g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko dalam rangka menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada Tingkat kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur dari penilaian resiko terdiri atas: (a) identifikasi resiko; dan (b) analisis resiko.

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Unsur kegiatan pengendalian terdiri atas: (a) review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; (b) pembinaan sumber daya manusia; (c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; (d) pengendalian fisik atas asset; (e) penetapan review atas indikator dan ukuran kinerja; (f) pemisahan tugas; (g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; (h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; (i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; (j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; serta (k) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern.

4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi dan mengkomunikasikan informasi dan harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Unsur informasi dan komunikasi terdiri atas: (a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan (b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern untuk dapat menilai kinerja dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Unsur pemantauan pengendalian intern terdiri atas: (a) pemantauan berkelanjutan; (b) evaluasi terpisah; dan (c) tindak lanjut.

2.1.7 Budaya Lokal

Budaya lokal pada hakikatnya merupakan warisan kolektif yang terbentuk dari pengalaman sejarah, interaksi sosial, serta lingkungan alam yang melingkupi kehidupan masyarakat. Koentjaraningrat (2009) mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar, sedangkan Sedyawati (2006) menegaskan bahwa budaya lokal adalah ekspresi nilai dan norma masyarakat setempat yang terwujud dalam adat, tradisi, bahasa, kesenian, dan pranata sosial. Dengan demikian, budaya lokal bukan hanya tradisi turun-temurun, melainkan juga modal sosial yang berfungsi menjaga identitas, menjadi pedoman perilaku, serta memberikan arah bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam konteks masyarakat Buton, budaya lokal lahir dari perpaduan tradisi setempat dengan ajaran Islam yang berkembang sejak abad ke-16, terutama setelah berdirinya Kesultanan Buton. Perpaduan tersebut melahirkan sistem budaya yang kokoh, yang kemudian dilembagakan melalui Undang-Undang Martabat Tujuh. Konstitusi ini bukan sekadar warisan sejarah, melainkan fondasi tata kelola pemerintahan yang mencakup aspek hukum, sosial, politik, dan keuangan daerah (Munawir & Hasaruddin, 2022).

Salah satu aspek penting dari Martabat Tujuh adalah falsafah Bhinci-Bhinciki Kuli, yang di dalamnya terkandung Sarapataanguna atau empat syarat kerukunan dan persaudaraan. Nilai-nilai yang tercakup di dalamnya yaitu Pomae-maeka (saling menghormati), Popia-piara (saling memelihara), Pomaa-Maasiaka (saling menyayangi), dan Poangka-angkataka (saling menghargai). Keempat prinsip ini berfungsi sebagai pedoman moral masyarakat Buton dalam membangun relasi sosial yang harmonis, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Adapun penjelasan mengenai Sarapataanguna atau empat syarat kerukunan dan persaudaraan menurut Mutawally (2023) adalah sebagai berikut:

1. Pomae-maeka (saling menghormati)

Prinsip Pomae-maeka mengandung nilai luhur yang menegaskan pentingnya sikap saling menghormati dan memuliakan sesama manusia. Konsep ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang sama. Dalam konteks ini, dimaknai sebagai kesadaran moral untuk tidak melanggar hak orang lain. Artinya, setiap anggota masyarakat dituntut untuk memiliki rasa segan atau takut berbuat sesuatu yang dapat merugikan sesamanya, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Dengan adanya rasa

takut yang timbal balik ini, hal ini menjadikan Pomae-maeka sebagai fondasi terciptanya suasana aman, damai, dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh, prinsip ini juga menekankan pentingnya kesadaran akan posisi dan kedudukan masing-masing individu dalam tatanan sosial. Dengan mengenali peran dan kedudukannya, baik yang berada pada posisi lebih tinggi maupun lebih rendah, setiap orang dapat menempatkan dirinya secara tepat sehingga tercipta hubungan yang saling menghormati dan menghargai.

2. Popia-piara (saling memelihara)

Prinsip Popia-piara bermakna bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban moral untuk senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara kedamaian serta ketenteraman dalam kehidupan bersama. Nilai ini menekankan pentingnya sikap saling membina, melindungi, dan menjaga baik aspek material maupun non-material, termasuk kehormatan, martabat, serta kedudukan setiap individu dalam masyarakat. Dengan adanya semangat saling memelihara ini, tercipta rasa aman, solidaritas, dan kesejahteraan bersama yang menjadi dasar terbentuknya harmoni sosial. Popia-piara juga menegaskan bahwa keberlangsungan masyarakat yang damai dan tenteram hanya dapat terwujud apabila setiap orang rela menjaga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Apabila nilai ini diabaikan, maka akan muncul kondisi yang berlawanan, yaitu praktik saling menjatuhkan, merugikan, bahkan menghancurkan satu sama lain. Dengan demikian, Popia-piara tidak hanya menjadi etika pergaulan antarindividu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah konflik dan perpecahan.

3. Pomaa-Maasiaka (saling menyayangi)

Prinsip Pomaa-maasiaka menekankan bahwa kehidupan masyarakat harus dibangun di atas rasa kasih sayang, kepedulian, dan perhatian yang tulus antarindividu. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap orang, tanpa memandang perbedaan usia, status sosial, kekayaan, kekuatan, ataupun agama, memiliki kewajiban moral untuk saling menyayangi dan melindungi. Baik antara yang tua dan muda, kaya dan miskin, kuat dan lemah, maupun antara pemerintah dan rakyat, semuanya terikat dalam hubungan yang didasari oleh rasa kemanusiaan. Sikap saling menyayangi ini lahir bukan karena adanya kepentingan tertentu, melainkan murni sebagai wujud kasih sayang yang tulus. Nilai ini menempatkan manusia dalam posisi yang setara, di mana perbedaan tidak menjadi alasan untuk menimbulkan jarak, melainkan justru menjadi kekuatan yang mempererat kebersamaan. Dengan hadirnya kasih sayang dalam relasi sosial, masyarakat dapat membangun suasana kekeluargaan yang menjadi ciri khas kehidupan sosial masyarakat Buton.

4. Poangka-angkataka (saling menghargai)

Prinsip Poangka-angkataka (saling menghargai) merupakan ajaran luhur masyarakat Buton yang menekankan pentingnya memuliakan martabat sesama manusia. Nilai ini mengajarkan bahwa kehidupan bersama akan semakin bermakna ketika setiap orang mampu melihat kelebihan orang lain, memberi apresiasi atas darma bakti yang telah diberikan, serta mengangkat kedudukan mereka di tengah masyarakat. Menghargai dalam falsafah Buton bukan sekadar memberi penghormatan secara formal, melainkan pengakuan tulus terhadap harkat dan martabat manusia. Melalui penghargaan yang setimpal, tercipta rasa saling mendukung dan menopang, sehingga

masyarakat terbebas dari sifat iri hati, dengki, atau upaya menjatuhkan orang lain. Poangka-angkataka menjadi fondasi sosial yang memperkuat kepercayaan dan solidaritas. Dengan adanya sikap saling menghargai, setiap individu merasa aman, diakui, dan dimuliakan, sehingga lahir hubungan sosial yang harmonis dan penuh kebersamaan.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Hubungan	Penelitian Terdahulu yang Mendukung	Penelitian Terdahulu yang Tidak Mendukung
1.	Kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan.	Nirwana (2015), Sukmaningtyas (2017), Jatmiko et al. (2020), Puspita & Virginia (2022), Sutrisna et al. (2022), Loe Mau et al. (2023), Amanda Yulia et al. (2024), Joko Prasetyo et al. (2024), Nauli & Daito (2024).	Krisandi & Sayekti (2021), Suliyantini & Kusmuriyanto, (2022).
2.	Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja keuangan.	Sukmaningtyas (2017), Yoan & Fran (2021), Sutrisna et al. (2022), Heinrich & Probohudono (2023), Sri Ayem & Rasni (2023). Nauli & Daito (2024).	Jatmiko et al. (2020), Desi Lestari et al. (2022), Loe Mau et al. (2023),
3.	Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan.	Sukmaningtyas (2017), Jatmiko et al. (2020), Sutrisna et al. (2022), Desi Lestari et al. (2022), Heinrich & Probohudono (2023), Amanda Yulia et al. (2024), Hirawan & Widarjo 2025).	Krisandi & Sayekti (2021).
4.	Budaya lokal terhadap kinerja keuangan.	Nirwana (2015), Wiagustini et al. (2017), Gusti Agung et al. (2020), Briando et al. (2024).	Astawa & Sukawati (2018).

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan indikator fundamental dalam menilai keberhasilan pengelolaan fiskal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan mengelola belanja secara optimal, tetapi juga memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Dalam membangun kerangka pemikiran, penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* sebagai landasan konseptual utama.

Teori *stakeholder* menurut R. Edward Freeman (2010), menjelaskan bahwa organisasi, termasuk pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada satu pihak, tetapi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat maupun terdampak oleh aktivitas organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, *stakeholder* meliputi masyarakat, pemerintah pusat, DPRD, aparatur sipil negara, lembaga pengawas, serta kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kondisi keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel dependen yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurut Ritonga (2015), kondisi keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban finansial, mengantisipasi kejadian tak terduga, serta mengeksekusi hak-hak keuangan secara efektif dan

efisien. Sementara itu, Nirwana (2015) menyatakan bahwa kondisi keuangan mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya, menyediakan layanan publik, dan menjaga keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, kondisi keuangan menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Konsep kondisi keuangan pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Dinapoli (2011), mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran anggaran dengan memanfaatkan berbagai sumber pendapatan daerah, serta tetap mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa kondisi keuangan tidak hanya berkaitan dengan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, tetapi juga mencerminkan kapasitas pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal serta menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Dinapoli (2011) bersama Wallace (1968) menjelaskan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah tidak terbentuk secara parsial, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu faktor lingkungan pemerintahan, faktor kelembagaan, dan faktor keuangan. Faktor lingkungan mencerminkan kondisi eksternal yang mempengaruhi kapasitas fiskal daerah, faktor kelembagaan berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif, sedangkan faktor keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan, mengendalikan pengeluaran, dan menjaga stabilitas operasional pelayanan publik. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama

membentuk gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah.

Dalam menjelaskan variasi kondisi keuangan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang berasal dari internal organisasi, yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Ketiga variabel tersebut dipandang sebagai determinan utama yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor fundamental dalam organisasi karena manusia menjadi pelaku utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Menurut Jatmiko et al. (2020) kompetensi merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki individu dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, Gasperz (2019) menegaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar individu yang menentukan kinerja unggul dalam suatu pekerjaan. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menyusun perencanaan anggaran yang realistis, melaksanakan program secara efektif, serta menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan lemahnya perencanaan, rendahnya penyerapan anggaran, serta ketidakakuratan laporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi keuangan pemerintah daerah.

Selain kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam era digital, teknologi informasi berperan sebagai alat yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan transparansi dalam pengolahan data keuangan. Menurut Andriani et al. (2020), pemanfaatan teknologi informasi

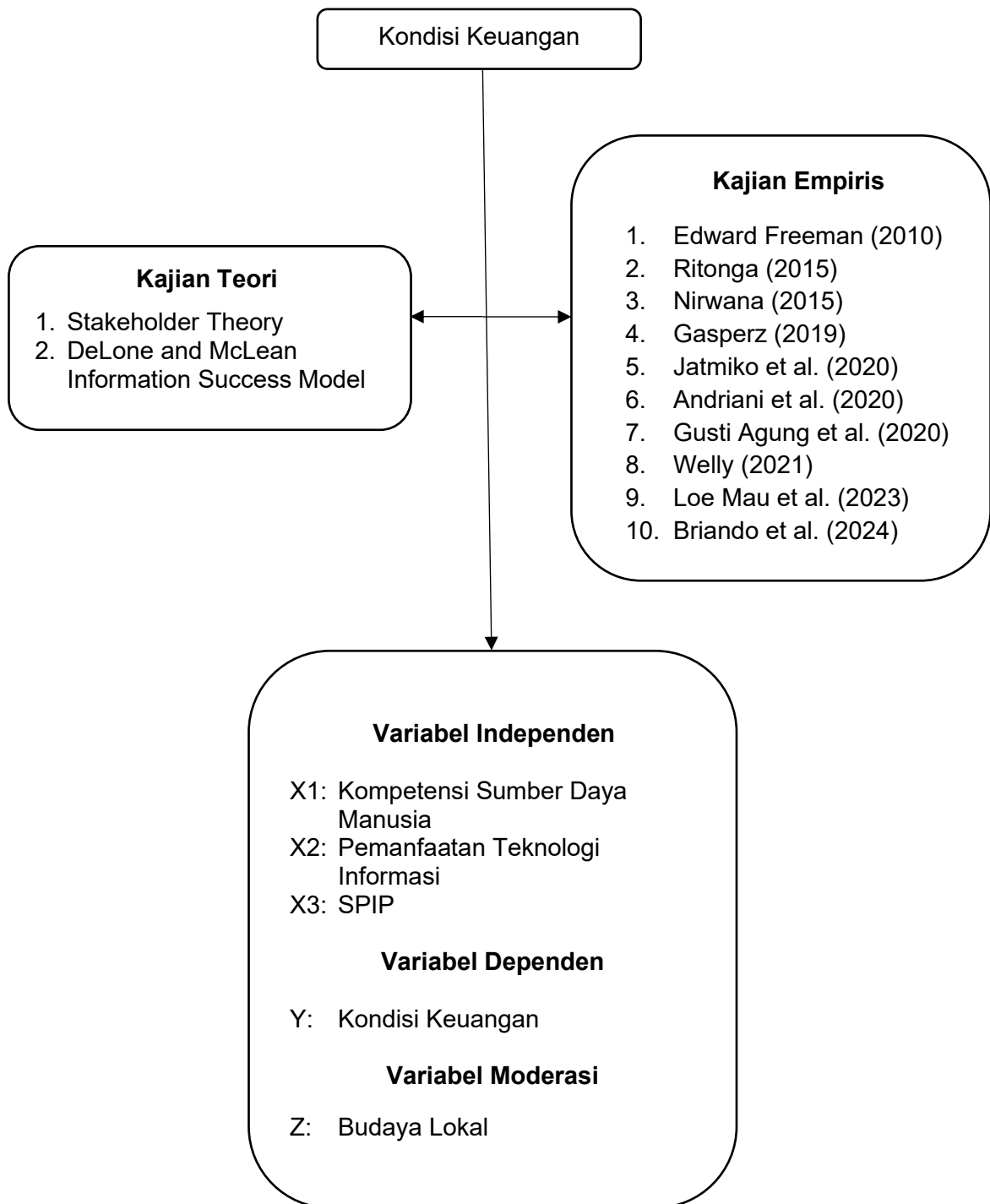
merupakan penggunaan sistem teknologi secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut, menurut *DeLone and McLean Information Success Model*, yang dikembangkan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean (2003) menjelaskan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan akan mempengaruhi tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna yang pada akhirnya menghasilkan manfaat bagi organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan meningkatkan efisiensi kerja, kualitas informasi keuangan, serta transparansi pengelolaan keuangan, sehingga berdampak positif terhadap kondisi keuangan.

Selanjutnya, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan faktor yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dalam organisasi. SPIP merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi yang meliputi efektivitas operasi, keandalan pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pengendalian intern harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh unsur organisasi. Menurut Welly (2021), SPIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses manajemen. Dengan demikian, penerapan SPIP yang efektif akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan berdampak pada kondisi keuangan pemerintah daerah.

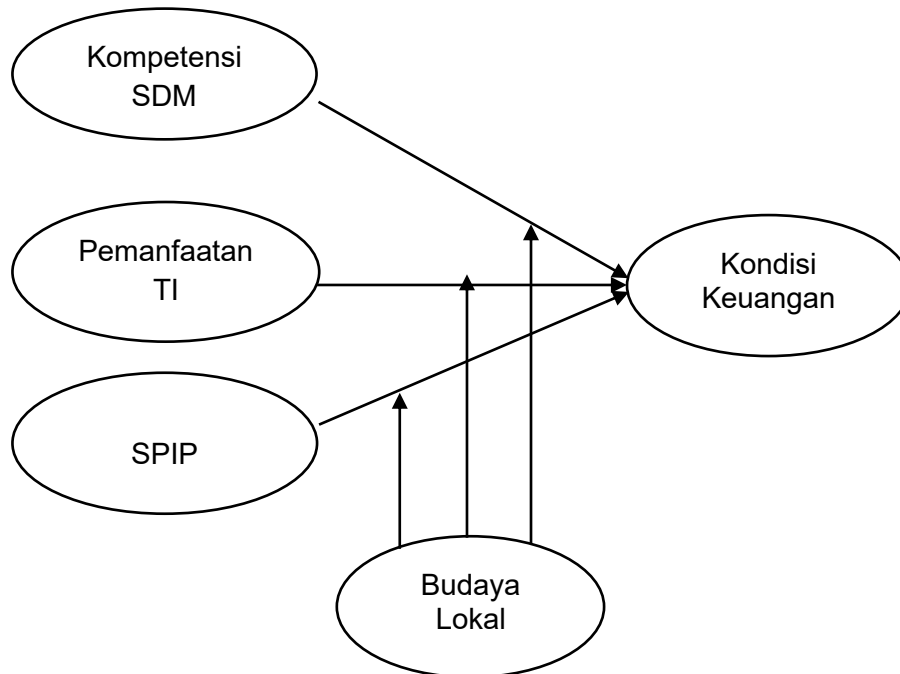
Namun demikian, hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kondisi keuangan tidak selalu bersifat langsung dan konsisten. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang turut mempengaruhi kekuatan hubungan tersebut. Dalam penelitian ini, faktor tersebut adalah budaya lokal yang diposisikan sebagai variabel moderasi.

Budaya lokal merupakan sistem nilai, norma, dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Menurut Gusti Agung et al. (2020) budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Sementara itu, Briando et al. (2024) menyatakan bahwa budaya lokal merupakan ekspresi nilai dan norma masyarakat yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat Buton, nilai-nilai budaya yang tercantum dalam falsafah Bhinci-Bhinciki Kuli yang mengandung empat prinsip *yaitu pomaemaeka* (saling menghormati), *popia-piara* (saling memelihara), *pomaa-maasiaka* (saling menyayangi), dan *poangka-angkataka* (saling menghargai) menjadi landasan moral dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut dapat mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja secara lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kajian pustaka yang telah diuraikan sebelumnya. Secara sistematis, kerangka pemikiran dan kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia menurut Gaspersz (2019) didefinisikan sebagai kombinasi keterampilan, pengetahuan, kemampuan, serta karakteristik lain yang harus dimiliki individu agar mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif. Kompetensi tersebut merupakan karakteristik dasar yang melekat pada seseorang, yang tercermin dalam cara berpikir dan berperilaku pada berbagai situasi, serta bersifat relatif stabil dalam jangka waktu yang panjang.

Kompetensi sumber daya manusia yang memadai memungkinkan aparaturnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah (Masnawati,

2015). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Nirwana (2015) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya, menjaga keseimbangan fiskal, serta menyediakan layanan publik secara berkelanjutan. Aparatur yang memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi pemerintahan dan perencanaan anggaran diharapkan mampu meminimalkan kesalahan, meningkatkan akurasi laporan keuangan, serta mendorong efisiensi penggunaan anggaran.

Secara empiris, hubungan tersebut didukung oleh hasil penelitian Sukmaningtyas (2017), Mery Sutrisna et al. (2022), dan Christina et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik pada akhirnya mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sehat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

3.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal. Warsita (2018) mendefinisikan teknologi informasi sebagai sarana dan prasarana yang meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan *useware*, beserta sistem dan metode yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah,

menafsirkan, menyimpan, mengorganisasi, serta memanfaatkan data secara bermakna.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi merujuk pada penggunaan teknologi secara optimal, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Andriani et al., 2020). Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif diyakini mampu meningkatkan ketepatan waktu serta kualitas informasi keuangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat (Hendrick & Probohudono, 2023).

Pandangan tersebut sejalan dengan *DeLone and McLean Information System Success Model* yang digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai keberhasilan sistem informasi dalam memberikan kontribusi positif bagi pengguna dan organisasi. Model ini mengidentifikasi enam dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat penggunaan atau niat untuk menggunakan, kepuasan pengguna, serta manfaat bersih yang diperoleh dari penerapan sistem informasi (Rulinawatya et al., 2024).

Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat mempermudah proses pencatatan, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan secara real-time. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada perbaikan kondisi keuangan daerah. Secara empiris, hal ini didukung oleh penelitian Mery Sutrisna et al. (2022) serta Hendrick dan Probohudono (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan berbasis teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

3.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh pimpinan serta seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, konsep tersebut diadopsi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern yang kuat berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan serta mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Welly, 2021). Kondisi tersebut secara langsung berkontribusi terhadap perbaikan indikator kondisi keuangan pemerintah daerah. Secara empiris, hal ini sejalan dengan penelitian Sukmaningtyas (2017) yang menemukan bahwa SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang lebih sehat dan akuntabel. Temuan serupa juga

dikemukakan oleh Hendrick dan Probohudono (2023) yang menyimpulkan bahwa unsur-unsur SPIP berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan, tertib, dan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

3.2.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Budaya Lokal sebagai Variabel Moderasi

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Djoko Setyo dan Andri Yandi (2022) menjelaskan bahwa kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja individu yang memungkinkan aparatur pemerintah melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya secara profesional dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dengan kompetensi yang baik, aparatur pemerintah dapat melakukan alokasi sumber daya secara efektif sehingga kondisi keuangan daerah lebih stabil, efisien, dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan oleh Ritonga (2015).

Penelitian Nirwana (2015) menemukan bahwa modal sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan, melainkan baru memberikan efek positif ketika diperkuat oleh modal budaya. Hal ini menegaskan pentingnya faktor budaya lokal yang dapat berperan sebagai variabel moderasi. Dalam konteks masyarakat Buton, budaya lokal yang berlandaskan falsafah Bhinci-Bhinciki Kuli melalui nilai Pomae-maeka (saling menghormati), Popia-piara (saling memelihara), Pomaa-maasiaka (saling menyayangi), dan Poangka-

angkataka (saling menghargai) berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang memperkuat legitimasi pemerintahan (Mutawally, 2023). Dengan demikian, budaya lokal dapat memperkuat hubungan antara kompetensi SDM dan kondisi keuangan daerah, karena kompetensi yang dimiliki aparatur akan lebih optimal ketika dijalankan dalam bingkai nilai-nilai budaya yang mendorong akuntabilitas, solidaritas, dan transparansi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Budaya lokal mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

3.2.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Budaya Lokal sebagai Variabel Moderasi

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien. Teknologi informasi membantu proses pencatatan, pelaporan, serta pengawasan anggaran menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Hendrick dan Probohudono (2023) menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas data dan mempercepat proses pengambilan Keputusan. Namun, teknologi informasi tidak dapat bekerja secara optimal jika hanya dipandang sebagai aspek teknis. Diperlukan fondasi nilai yang mengarahkan penggunaan teknologi tersebut agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, budaya lokal masyarakat Buton berperan penting. menjadi pedoman moral yang mampu memoderasi penggunaan teknologi informasi (Munawir & Hasaruddin, 2022). Nilai-nilai ini menuntun aparatur pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab, transparan, dan

berorientasi pada kepentingan bersama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Budaya lokal mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

3.2.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Budaya lokal sebagai Variabel Moderasi

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tias Monica et al., (2023) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat meminimalkan potensi kecurangan dan kesalahan, serta meningkatkan akurasi informasi keuangan. Dengan pelaksanaan SPIP yang baik, pemerintah daerah dapat mengelola risiko fiskal secara lebih terkendali, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki kondisi keuangan secara keseluruhan.

Keberhasilan penerapan SPIP tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya lokal yang mampu memperkuat integritas aparatur, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab (Munawir & Hasaruddin, 2022). Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Budaya lokal mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pada tingkat organisasi, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang ditetapkan. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel bebas (*independent variable*), terdiri dari kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemertintah (SPIP).
- b. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kondisi keuangan.
- c. Variabel moderasi (*moderating variable*) yaitu budaya lokal.

4.2 Situs dan Waktu Penelitian

Situs atau lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pulau Buton. Adapun waktu yang digunakan selama melakukan penelitian kurang lebih selama tiga bulan.

4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di wilayah Pulau Buton. Mengingat jumlah populasi yang relatif

besar, maka penelitian ini menggunakan sampel sebagai bagian dari populasi yang dianggap mampu mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Melalui pengamatan terhadap sampel, peneliti diharapkan dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian.

Pengambilan sampel merupakan proses pemilihan sejumlah elemen dari populasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan, sehingga karakteristik sampel tersebut dapat mencerminkan karakteristik populasi. Alasan pengambilan sampel ini dikarenakan besarnya ukuran populasi tidak memungkinkan diambil keseluruhan karena terhalang oleh faktor waktu, biaya dan sumber daya manusia lainnya (Sekaran, 2006,22). Berdasarkan pertimbangan tersebut, sampel penelitian ini difokuskan pada sebagian OPD yang berada di tiga wilayah, yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah.

Pemilihan ketiga daerah ini didasarkan pada pertimbangan representativitas, di mana Kota Baubau berperan sebagai pusat pemerintahan, sejarah, dan budaya di wilayah Pulau Buton, Kabupaten Buton merupakan wilayah induk sebelum terjadinya pemekaran daerah, serta Kabupaten Buton Tengah merupakan daerah pemekaran yang relatif baru dengan dinamika tata kelola pemerintahan yang sedang berkembang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* diartikan sebagai teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun karakteristik atau kriteria *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.
2. OPD yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
3. OPD yang telah menerapkan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital, yang digunakan secara aktif dalam mendukung proses administrasi, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah.
4. OPD yang telah mengimplementasikan komponen-komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran.

4.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara dan pembagian pertanyaan/kuesioner tentang variabel-variabel penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Data dapat meliputi data keuangan, struktur pendapatan, jumlah SKPD, dan data sekunder lainnya berupa literature dari berbagai buku, jurnal, dan media internet.

4.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner, yaitu memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden.
2. Studi Literatur, yaitu mengumpulkan informasi dengan mempelajari sumber data tertulis yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

4.6.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu: (1) variabel independen yang terdiri dari kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi; dan sistem pengendalian intern pemerintah; (2) variabel dependen yaitu kondisi keuangan; dan (3) variabel moderasi yaitu budaya lokal.

4.6.2 Definisi Operasional

4.6.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Kompetensi SDM menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 merujuk pada standar kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Kompetensi sumber daya manusia menurut Gasperz (2019) dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu: (1) pengetahuan; (2) keterampilan; dan (3) perilaku. Aspek pengetahuan merujuk pada pemahaman teoritis dan informasi yang mendalam dan relevan mengenai bidang pekerjaan, sehingga individu mampu menguasai konsep, prinsip, serta

prosedur yang berkaitan dengan tugas. Sementara itu, aspek keterampilan menekankan pada kemampuan praktis dan teknis yang harus dimiliki individu untuk menjalankan tugas atau pekerjaan secara tepat dan terampil, mencakup penggunaan alat, teknik, serta metode kerja yang sesuai. Selain itu, perilaku merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap, motivasi, disiplin, dan etika kerja yang harus ditunjukkan oleh individu dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Perilaku kerja ini sangat penting karena menentukan bagaimana seseorang menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam situasi kerja yang sesungguhnya dan untuk menjamin hubungan profesional dengan rekan kerja maupun atasan.

4.6.2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Pemanfaatan teknologi informasi diartikan sebagai penggunaan seluruh bentuk teknologi untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung aktivitas operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Definisi operasional variabel ini mengacu pada *DeLone dan McLean Information Success Model* yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi. Model ini berperan sebagai kerangka evaluatif yang menyeluruh untuk mengukur sejauh mana sistem informasi dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunaannya maupun bagi organisasi yang menerapkannya (Rulinawaty et al., 2024). Dalam versi penyempurnaan tahun 2003, model ini mengidentifikasi enam dimensi kunci yang saling terhubung, yaitu: (1) kualitas sistem; (2) kualitas informasi; (3) kualitas layanan; (4) tingkat penggunaan atau niat untuk menggunakan; (5) kepuasan pengguna; serta (6) manfaat bersih.

4.6.2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah bentuk pengendalian internal yang secara khusus diterapkan di lingkungan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPIP bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi agar tetap aman dan terkelola dengan baik, memastikan ketelitian dan keandalan data akuntansi yang digunakan dalam proses pelaporan, mendorong efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menurut Jatmiko et al., (2020) terdiri dari lima indikator yaitu: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian resiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan.

4.6.2.4 Budaya Lokal (Z)

Budaya lokal merupakan sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat yang menjaga identitas, menjadi pedoman perilaku, serta memberikan arah bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks masyarakat Buton, budaya lokal diukur berdasarkan falsafah Bhinci Bhinciki Kuli dalam Undang-Undang Martabat Tujuh, yang di dalamnya terkandung Sarapataanguna atau empat syarat kerukunan dan persaudaraan. Nilai-nilai yang tercakup di dalamnya yaitu: (1) Pomae-maeka (saling menghormati); (2) Popia-piara (saling memelihara); (3) Poma-Maasiaka (saling

menyayangi); dan (4) Poangka-angkataka (saling menghargai). Keempat prinsip ini berfungsi sebagai pedoman moral masyarakat Buton dalam membangun relasi sosial yang harmonis, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Mutawally, 2023).

4.6.2.5 Kondisi Keuangan (Y)

Kondisi keuangan diartikan sebagai kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban finansialnya, mengelola hak keuangannya secara efektif dan efisien, serta mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga. Dimensi pengukuran menurut Dinapoli (2011) adalah sebagai berikut:

1. Dimensi lingkungan pemerintahan, dimensi ini adalah kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya indikator dari dimensi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan masyarakat, adalah meningkatnya kebutuhan layanan publik.
 - b. Populasi, adalah meningkatnya jumlah penduduk lokal.
 - c. Nilai properti, adalah kapasitas sarana layanan publik.
 - d. Inflasi, adalah menurunnya nilai anggaran karena kondisi ekonomi yang menurun.
 - e. Pendapatan individu, adalah meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat lokal.
 - f. Pengangguran, adalah meningkatnya jumlah pencari kerja.
2. Dimensi kelembagaan, dimensi ini adalah kemampuan lembaga dalam mengalokasikan keuangan berdasarkan Tingkat kebutuhan layanan secara tepat. Indikator dari dimensi ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan anggaran, yang mengindikasikan adanya ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - b. Ketepatan waktu dan akurasi transaksi keuangan, yang mengindikasikan berkurangnya penundaan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.
 - c. Kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan, adalah cepatnya dan tidak adanya pengecualian atau temuan pengawas dalam laporan keuangan.
3. Dimensi keuangan, dimensi keuangan adalah kemampuan untuk memperoleh pendapatan, mengendalikan pengeluaran, dan menjaga operasional layanan. Indikator dari dimensi ini adalah sebagai berikut:
- a. Batasan utang, adalah adanya batas maksimal hutang pemerintah daerah.
 - b. Potensi pajak, adalah pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi.
 - c. Legalitas pengeluaran, adalah persentase pengeluaran berdasarkan anggaran.

Tabel 4.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) (Gasperz, 2019).	Standar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.		1. Pengetahuan. 2. Keterampilan. 3. Perilaku.
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) (Rulinawaty et al., 2024).	Penggunaan seluruh bentuk teknologi untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung aktivitas operasional dan		1. Kualitas sistem. 2. Kualitas informasi. 3. Kualitas layanan. 4. Tingkat penggunaan

	pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.		atau niat untuk menggunakan. 5. Kepuasan pengguna. 6. Manfaat bersih.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) (Jatmiko et al., 2020).	Bentuk pengendalian internal yang tujuannya untuk menjaga kekayaan organisasi agar terkelola dengan baik, memastikan ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.		1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian resiko. 3. Kegiatan pengendalian. 4. Informasi dan komunikasi. 5. Pemantauan.
Budaya Lokal (Z) (Mutawally, 2023).	Sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat yang menjaga identitas, menjadi pedoman perilaku, serta memberikan arah bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi.		1. Pomae-maeka (saling menghormati). 2. Popia-piara (saling memelihara). 3. Pomaa-Maasiaka (saling menyayangi). 4. Poangka angkataka (saling menghargai).
Kondisi Keuangan Daerah (Y) (Dinapolli, 2011).	Kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban finansialnya, mengelola hak keuangannya secara efektif dan efisien, serta mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga.	Lingkungan	1. Kebutuhan masyarakat. 2. Populasi. 3. Nilai property. 4. Inflasi. 5. Pendapatan individu. 6. Pengangguran
		Kelembagaan	1. Ketersediaan anggaran. 2. Ketepatan waktu dan akurasi transaksi keuangan.

			3. Kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
		Keuangan	1. Balasan utang. 2. Potensi pajak. 3. Legalitas pengeluaran.

4.7 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa kuesioner, yakni dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode ini dipilih sebagai cara untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian. Skala Likert digunakan sebagai alat ukur yang memungkinkan responden menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Skala likert terdiri dari lima tingkatan yaitu:

- a. Untuk jawaban sangat setuju diberi nilai = 5
- b. Untuk jawaban setuju diberi nilai = 4
- c. Untuk jawaban netral diberi nilai = 3
- d. Untuk jawaban tidak setuju diberi nilai = 2
- e. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi nilai = 1

4.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan analisis moderasi dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Analisis ini akan memberikan hasil yang jelas dengan menggunakan pengujian validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selain itu, dilakukan juga analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis.

4.8.1 Uji Kualitas Data

4.8.1.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* dengan melihat output *pearson correlation*. Dengan kriteria jika nilai sig (2-tailed) pada total skor konstruk $< 0,05$ item pertanyaan atau pernyataan dikatakan valid.

4.8.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah suatu tingkatan yang mengukur konsistensi hasil jika dilakukan pengukuran berulang pada suatu karakteristik (Ghozali, 2016). Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu. Pengujian reliabilitas di dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

4.8.2 Uji Asumsi Klasik

4.8.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk menguji model regresi variabel dependen dan independent mempunyai kontribusi normal. Model regresi yang baik Adalah model yang mempunyai distribusi residual normal

atau mendekati normal. Uji Kolmogorov-Smirnov yaitu cara untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, dengan memasukkan nilai residual dalam pengujian non parametrik. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ dan $Z > 1,96$, artinya data tidak terdistribusi normal. Sedangkan apabila $Z > 1,96$ dan signifikan $> 0,05$, artinya data terdistribusi secara normal.

4.8.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value. Jika nilai tolerance value $< 0,10$ atau dengan nilai VIF > 10 maka ada multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai tolerance value $> 0,10$ atau dengan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016).

4.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual (kesalahan pengganggu) pada setiap nilai variabel independen. Asumsi dasar dalam regresi linier berganda adalah bahwa varians residual harus bersifat konstan atau homogen (homoskedastisitas). Apabila varians residual berbeda-beda pada tingkat nilai variabel independen yang berbeda, maka kondisi tersebut disebut heteroskedastisitas.

Penilaian pada uji ini dilihat dari nilai signifikan, apabila nilai signifikannya lebih besar dari $0,05$ ($p > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

gejala heteroskedastisitas atau model regresi bersifat homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka menunjukkan adanya heteroskedastisitas, yang berarti varians residual tidak seragam.

4.8.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti dilihat dari nilai rata-rata, median nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Statistik deskriptif memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, budaya lokal dan kondisi keuangan.

4.8.4 Pengujian Hipotesis

4.8.4.1 Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) terhadap kondisi keuangan (Y) sebelum memasukkan variabel moderasi.

4.8.4.2 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi. Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dan pengaruhnya setelah dimoderasi. Pengujian hipotesis ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah regresi linear berganda yang dilakukan tanpa adanya variabel moderasi, dan tahap kedua dilakukan dengan adanya interaksi antara variabel moderasi dan variabel independent terhadap variabel dependent. Rumus persamaannya sebagai berikut:

$$(1) \quad Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

$$(2) \quad Y = \alpha + b_1X_1Z + b_2X_2Z + b_3X_3Z + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y : Kondisi Keuangan

α : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia

X₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₃ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Z : Budaya Lokal

e : Error (tingkat kesalahan pendugaan dalam penelitian)

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Deskripsi Data

5.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Baubau, Pemerintah Kabupaten Buton, dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Ketiga pemerintah daerah tersebut merupakan bagian dari wilayah Pulau Buton yang memiliki karakteristik pembangunan, kapasitas fiskal, serta dinamika pengelolaan keuangan daerah yang relatif beragam. OPD sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, OPD berfungsi sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggung jawaban anggaran. Oleh karena itu, kinerja keuangan OPD sangat menentukan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan serta berpengaruh langsung terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dari 30 OPD akan diambil 10 OPD di masing-masing wilayah. Alasan pengambilan sampel ini dikarenakan besarnya ukuran populasi tidak memungkinkan diambil keseluruhan

karena terhalang oleh faktor waktu, biaya dan sumber daya manusia lainnya (Sekaran, 2006).

Sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri atas Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta Sekretariat Daerah. Kesepuluh OPD tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengelolaan keuangan daerah dan berperan strategis dalam mendukung akuntabilitas serta transparansi keuangan pemerintah daerah.

5.1.2 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode angket. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun secara sistematis berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Responden dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran di sepuluh dinas yang berada di tiga kabupaten, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 90 orang.

Tabel 5.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan	90
Kuesioner yang kembali	90
Kuesioner yang tidak kembali	-
Kuesioner yang dapat diolah	90
Tingkat pengembalian yang digunakan (<i>Responden Rate</i>)	100%

Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2025

Berdasarkan data diatas dilihat bahwa sebanyak 90 kuesioner telah disebarkan kepada responden, dengan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 90 sehingga tidak ada kuesioner yang tidak Kembali. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah sebanyak 90 dengan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%. Selanjutnya Gambaran umum mengenai karakteristik responden yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Karakteristik Responden

Karakteristik	Kriteria	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	63	70%
	Perempuan	27	30%
Umur	20-30 Tahun	2	2,22%
	31-40 Tahun	14	15,56%
	41-50 Tahun	37	41,11%
	>50 Tahun	37	41,11%
Pendidikan	SMA	2	2,22%
	D3	1	1,11%
	S1	61	67,78%
	S2	26	28,89%

Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini ditinjau dari tiga aspek utama, yaitu jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan dengan total sampel sebanyak 90 responden. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi yang signifikan oleh kelompok laki-laki, yakni sebanyak 63 orang (70%), sedangkan kelompok perempuan berjumlah 27 orang (30%). Dari sisi profil usia, responden didominasi oleh kelompok usia matang dan senior, di mana kelompok usia 41–50 tahun dan kelompok di atas 50 tahun memiliki proporsi yang sama besar, yaitu masing-masing sebanyak 37 orang (41,11%). Sementara itu, responden dengan usia 31–40 tahun tercatat sebanyak 14 orang (15,56%) dan kelompok usia termuda 20–30 tahun merupakan kelompok terkecil dengan jumlah 2 orang

(2,22%). Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas partisipan penelitian berada pada tahapan usia produktif akhir yang umumnya memiliki pengalaman yang lebih baik dan profesional.

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas responden merupakan individu berpendidikan tinggi dengan tingkat kelulusan Strata 1 (S1) mencapai 61 orang (67,78%) dan Strata 2 (S2) sebanyak 26 orang (28,89%). Selebihnya merupakan lulusan SMA sebanyak 2 orang (2,22%) dan D3 sebanyak 1 orang (1,11%). Tingginya persentase responden dengan latar belakang pendidikan tinggi, yang secara akumulatif mencapai 96,67% (S1 dan S2), memberikan indikasi kuat bahwa responden memiliki kompetensi intelektual dan daya nalar yang memadai dalam memahami serta memberikan jawaban yang objektif terhadap butir-butir instrumen penelitian yang diberikan. Secara keseluruhan, profil demografis ini memberikan landasan yang kokoh bagi validitas data penelitian karena didukung oleh responden yang memiliki kematangan usia dan taraf pendidikan yang sangat baik.

5.2 Uji Instrument

5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam analisis data penelitian. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur konstruk atau variabel penelitian, sehingga data yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi empiris secara akurat. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasinya lebih besar dari nilai r tabel pada tingkat signifikansi 0,05. Berikut ini adalah hasil uji validitas.

Tabel 5.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Indikator	R hitung	R tabel 5%	Keterangan
X1-1	0,691	0,207	Valid
X1-2	0,836	0,207	Valid
X1-3	0,748	0,207	Valid
X1-4	0,850	0,207	Valid
X1-5	0,730	0,207	Valid
X1-6	0,747	0,207	Valid
X1-7	0,712	0,207	Valid
X1-8	0,794	0,207	Valid
X1-9	0,879	0,207	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tabel tersebut menyajikan hasil uji validitas untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) yang terdiri dari sembilan indikator pernyataan yaitu X1-1 sampai dengan X1-9. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh indikator memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan pada variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki korelasi yang kuat dan signifikan. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia.

Tabel 5.4 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Indikator	R hitung	R tabel 5%	Keterangan
X2-1	0,610	0,207	Valid
X2-2	0,624	0,207	Valid
X2-3	0,745	0,207	Valid
X2-4	0,681	0,207	Valid
X2-5	0,749	0,207	Valid
X2-6	0,724	0,207	Valid
X2-7	0,722	0,207	Valid
X2-8	0,573	0,207	Valid
X2-9	0,678	0,207	Valid
X2-10	0,778	0,207	Valid
X2-11	0,589	0,207	Valid

Indikator	R hitung	R tabel 5%	Keterangan
X2-12	0,636	0,207	Valid
X2-13	0,635	0,207	Valid
X2-14	0,537	0,207	Valid
X2-15	0,591	0,207	Valid
X2-16	0,374	0,207	Valid
X2-17	0,282	0,207	Valid
X2-18	0,425	0,207	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2025

Tabel 5.4 menampilkan hasil uji validitas instrument penelitian untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) yang diukur melalui delapan belas indikator, yaitu X2-1 sampai dengan X2-18. Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh indikator pada variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap item pernyataan memiliki Tingkat keterkaitan yang memadai dengan konstruk yang diukur. Oleh karena itu, seluruh indikator dinyatakan valid.

Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)

Indikator	R hitung	R tabel 5%	Keterangan
X3-1	0,430	0,207	Valid
X3-2	0,371	0,207	Valid
X3-3	0,526	0,207	Valid
X3-4	0,530	0,207	Valid
X3-5	0,548	0,207	Valid
X3-6	0,669	0,207	Valid
X3-7	0,524	0,207	Valid
X3-8	0,535	0,207	Valid
X3-9	0,506	0,207	Valid
X3-10	0,664	0,207	Valid
X3-11	0,613	0,207	Valid
X3-12	0,325	0,207	Valid
X3-13	0,475	0,207	Valid
X3-14	0,475	0,207	Valid
X3-15	0,509	0,207	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2025

Tabel diatas menggambarkan hasil pengujian validitas terhadap instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3). Variabel ini dioperasikan melalui lima belas indikator pernyataan. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel pada taraf signifikan 5% (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap indikator dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruk SPIP secara memadai dan konsisten.

Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan (Y)

Indikator	R hitung	R tabel 5%	Keterangan
Y1	0,499	0,207	Valid
Y2	0,455	0,207	Valid
Y3	0,567	0,207	Valid
Y4	0,373	0,207	Valid
Y5	0,362	0,207	Valid
Y6	0,562	0,207	Valid
Y7	0,514	0,207	Valid
Y8	0,478	0,207	Valid
Y9	0,336	0,207	Valid
Y10	0,486	0,207	Valid
Y11	0,579	0,207	Valid
Y12	0,666	0,207	Valid
Y13	0,506	0,207	Valid
Y14	0,584	0,207	Valid
Y15	0,654	0,207	Valid
Y16	0,655	0,207	Valid
Y17	0,615	0,207	Valid
Y18	0,637	0,207	Valid
Y19	0,582	0,207	Valid
Y20	0,475	0,207	Valid
Y21	0,490	0,207	Valid
Y22	0,544	0,207	Valid
Y23	0,470	0,207	Valid
Y24	0,389	0,207	Valid
Y25	0,541	0,207	Valid
Y26	0,457	0,207	Valid
Y27	0,522	0,207	Valid
Y28	0,437	0,207	Valid

Indikator	R Hitung	R tabel 5%	Keterangan
Y29	0,377	0,207	Valid
Y30	0,345	0,207	Valid
Y31	0,425	0,207	Valid
Y32	0,362	0,207	Valid
Y33	0,343	0,207	Valid
Y34	0,292	0,207	Valid
Y35	0,211	0,207	Valid
Y36	0,437	0,207	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan tabel 5.6 diatas menyajikan hasil uji validitas untuk variabel Kondisi Keuangan (Y) yang diukur melalui tiga puluh enam butir pernyataan yang telah disusun. Berdasarkan hasil analisis data, seluruh indikator menunjukkan hasil yang valid. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kondisi keuangan pemerintah daerah telah memenuhi kriteria validitas yang ditetapkan.

Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Lokal (Z)

Indikator	R hitung	R tabel 5%	Keterangan
Z1	0,848	0,207	Valid
Z2	0,843	0,207	Valid
Z3	0,868	0,207	Valid
Z4	0,833	0,207	Valid
Z5	0,779	0,207	Valid
Z6	0,776	0,207	Valid
Z7	0,736	0,207	Valid
Z8	0,856	0,207	Valid
Z9	0,857	0,207	Valid
Z10	0,844	0,207	Valid
Z11	0,851	0,207	Valid
Z12	0,813	0,207	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan hasil uji validitas terhadap instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Budaya Lokal (Z) yang berperan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Variabel budaya lokal

dioperasionalkan ke dalam dua belas indikator pernyataan, mulai dari Z1 hingga Z12. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, yang menunjukkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid. Validitas seluruh indikator tersebut menjadi sangat penting mengingat peran budaya lokal sebagai variabel moderasi, yang berfungsi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Dengan terpenuhinya kriteria validitas, instrumen budaya lokal dinilai mampu menangkap karakteristik sosial dan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam lingkungan pemerintah daerah.

5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keandalan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang relatif stabil dan konsisten apabila digunakan pada kondisi dan waktu yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan terhadap seluruh variabel-variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, dimana suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh $\geq 0,70$. Semakin angkanya mendekati angka 1, maka menunjukkan tingkat konsistensi reliabilitas yang semakin tinggi yang menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan tersebut secara bersama-sama mampu mengukur konstruk yang sama secara andal. Sebaliknya, apabila nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,70, maka instrumen perlu dievaluasi atau direvisi agar hasil pengukuran menjadi lebih konsisten dan dapat dipercaya.

Tabel 5.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Standar Koefisien Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,70	0,918	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,70	0,900	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,70	0,800	Reliabel
Kondisi Keuangan	0,70	0,903	Reliabel
Budaya Lokal	0,70	0,957	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha yang berada diatas batas minimum, yaitu 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam merepresentasikan konstruk yang diukur pada masing-masing variabel. Dengan demikian, instrument penelitian yang digunakan dapat dinyatakan reliabel karena mampu menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya.

5.3 Uji Asumsi Klasik

5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi telah memenuhi asumsi distribusi normal. Asumsi ini sangat penting karena validitas hasil pengujian statistic dalam analisis regresi linear bergantung pada terpenuhinya syarat bahwa residual data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogriv-Smirnov* (KS) pada setiap variabel penelitian.

Dasar pengambilan keputusan pada uji *Kolmogorov–Smirnov* didasarkan pada nilai signifikansi (Sig.) yang dihasilkan. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), maka data dianggap berdistribusi normal, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara distribusi data penelitian dan distribusi normal teoritis.

Tabel 5.9 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	10.76021423
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.042
	Negative	-.058
Test Statistic		.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal, karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data penelitian dan distribusi normal teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi, sehingga data layak digunakan untuk analisis statistik selanjutnya.

5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi berganda. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap variabel bebas memiliki

kontribusi yang berbeda dan independen dalam menjelaskan variabel dependen, tanpa terjadi tumpang tindih informasi antar variabel independen. Adanya hubungan yang tinggi antar variabel bebas dapat menimbulkan masalah multikolinearitas, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi, meningkatnya varians, serta menurunkan ketepatan dan keandalan interpretasi hasil analisis.

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan indikator nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria pengambilan keputusan menetapkan bahwa apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai *Tolerance* < 0,10 dan VIF > 10 mengindikasikan adanya multikolinearitas. Dengan demikian, hasil pengujian yang menunjukkan tidak ditemukannya multikolinearitas menandakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan.

Tabel 5.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0.902	1.108	Non multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,812	1.232	Non multikolinearitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	0,978	1.023	Non multikolinearitas
Budaya Lokal (Z)	0,824	1.214	Non multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan Tabel 5.10 yang menyajikan hasil uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam model regresi memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antar

variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Kondisi ini menandakan bahwa masing-masing variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara independen tanpa adanya tumpang tindih informasi.

5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan pada setiap tingkat variabel independen. Salah satu asumsi penting dalam regresi linier berganda adalah bahwa residual memiliki varians yang sama atau bersifat homogen (homoskedastisitas). Apabila varians residual berbeda pada nilai variabel independen yang berbeda, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya heteroskedastisitas, yang dapat menyebabkan hasil estimasi koefisien regresi menjadi kurang efisien dan memengaruhi ketepatan pengujian signifikansi.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka menunjukkan adanya heteroskedastisitas, yang berarti varians residual tidak seragam.

Tabel 5.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
<i>(Constant)</i>	0,43	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,07	Non Heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,72	Non Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	0,45	Non Heteroskedastisitas
Budaya Lokal (Z)	0,35	Non Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang tercantum pada Tabel 5.11, diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari standar signifikansi 0,05. Secara spesifik, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) menunjukkan nilai 0,07, Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) sebesar 0,72, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) sebesar 0,45, dan Budaya Lokal (Z) sebesar 0,35. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang berarti terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

5.4 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan sebagai langkah fundamental untuk mengeksplorasi serta memberikan gambaran umum yang komprehensif mengenai data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk memahami distribusi frekuensi dan pemusatan data secara empiris sebelum dilakukan pengujian hipotesis yang lebih kompleks. Melalui prosedur ini, data mentah di transformasi menjadi informasi yang lebih bermakna guna mengidentifikasi karakteristik utama serta kecenderungan umum dari masing-masing variabel penelitian, baik variabel independen, dependen, maupun moderasi.

Proses analisis ini mencakup pengamatan terhadap nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta standar deviasi, yang secara keseluruhan memberikan informasi mengenai penyebaran dan kecenderungan data. Hasil analisis statistik deskriptif tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman terhadap data penelitian.

5.4.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Analisis deskriptif pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur dengan menggunakan 3 indikator dengan 9 pernyataan, yang didistribusikan dengan frekuensi jawaban responden pada tiap indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.12 Statistik Deskriptif Kompetensi Sumber Daya Manusia

Indikator	Item	SS	S	N	TS	STS	Rata-Rata Indikator
Pengetahuan	X1.1	3	33	51	3	0	3,40
	X1.2	5	34	46	5	0	3,43
	X1.3	4	39	36	11	0	3,40
Keterampilan	X1.4	8	33	41	8	0	3,46
	X1.5	7	21	61	1	0	3,38
	X1.6	7	30	50	3	0	3,46
Perilaku	X1.7	2	39	44	5	0	3,42
	X1.8	8	23	49	10	0	3,32
	X1.9	10	36	39	5	0	3,57

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang dipaparkan pada Tabel 5.12, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) diukur melalui tiga indikator utama, yaitu Pengetahuan, Keterampilan, dan Perilaku, yang dijabarkan ke dalam sembilan butir pernyataan instrumen. Secara umum, persepsi responden terhadap variabel ini menunjukkan kecenderungan yang positif dengan distribusi jawaban yang didominasi oleh kategori Netral (N) dan Setuju (S).

Pada indikator Pengetahuan, rata-rata penilaian responden berada pada rentang 3,40 hingga 3,43. Skor tertinggi pada indikator ini terdapat pada item X1.2 dengan nilai rata-rata sebesar 3,43, yang mengindikasikan bahwa responden memiliki pemahaman teoritis yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Indikator Keterampilan diukur melalui item X1.4, X1.5, dan X1.6, di mana nilai rata-rata tertinggi dicapai oleh item X1.6 sebesar 3,46. Hal ini menunjukkan bahwa kecakapan teknis yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam organisasi telah terimplementasi dengan baik. Selanjutnya, pada indikator Perilaku, terdapat variabilitas persepsi yang cukup menarik. Item X1.9 mencatatkan nilai rata-rata tertinggi di antara seluruh pernyataan dalam variabel ini, yaitu sebesar 3,57. Capaian ini merepresentasikan bahwa aspek perilaku kerja, merupakan kekuatan utama dalam dimensi kompetensi sumber daya manusia. Sebaliknya, item X1.8 menunjukkan nilai rata-rata terendah sebesar 3,32, yang mengindikasikan adanya ruang untuk optimalisasi lebih lanjut pada aspek perilaku tertentu guna meningkatkan performa kompetensi secara komprehensif.

Secara keseluruhan, perolehan nilai rata-rata pada setiap indikator yang berada di atas angka 3,00 menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini berada pada kategori yang baik dan stabil. Data ini memberikan fondasi empiris bahwa subjek penelitian memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menjalankan fungsi organisasi secara efektif.

5.4.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Analisis deskriptif pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diukur dengan menggunakan 6 indikator dengan 18 pernyataan, yang didistribusikan

dengan frekuensi jawaban responden pada tiap indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.13 Statistik Deskriptif Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator	Item	SS	S	N	TS	STS	Rata-Rata Indikator
Kualitas Sistem	X2.1	2	51	34	3	0	3,58
	X2.2	3	37	46	4	0	3,43
	X2.3	5	33	43	9	0	3,38
Kualitas Informasi	X2.4	5	39	37	9	0	3,44
	X2.5	6	47	32	5	0	3,60
	X2.6	2	53	26	9	0	3,53
Kualitas Layanan	X2.7	5	47	35	3	0	3,60
	X2.8	3	34	49	4	0	3,40
	X2.9	3	47	36	4	0	3,54
Tingkat Penggunaan	X2.10	6	44	31	9	0	3,52
	X2.11	6	40	43	1	0	3,57
	X2.12	6	35	42	7	0	3,44
Kepuasan Pengguna	X2.13	4	42	41	3	0	3,52
	X2.14	7	37	45	1	0	3,56
	X2.15	4	42	42	2	0	3,53
Manfaat Bersih	X2.16	6	46	36	2	0	3,62
	X2.17	9	47	27	7	0	3,64
	X2.18	7	50	33	0	0	3,71

Sumber: Hasil olah data, 2025

Pemaparan pada Tabel 5.13 menjelaskan bahwa secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi informasi dipersepsikan sangat baik oleh responden dengan seluruh nilai rata-rata indikator berada pada rentang 3,38 hingga 3,71. Dimensi manfaat bersih menunjukkan performa yang paling unggul, di mana item X2.18 mencatatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,71, yang merepresentasikan

bahwa teknologi informasi telah memberikan dampak positif secara signifikan bagi para pengguna dalam menjalankan tugas mereka.

Apresiasi responden yang tinggi juga terlihat pada indikator kualitas informasi serta kualitas layanan, khususnya pada item X2.5 dan X2.7 yang masing-masing memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,60. Di sisi lain, meskipun secara umum menunjukkan hasil yang positif, item X2.3 pada dimensi kualitas sistem memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 3,38, yang mengindikasikan adanya ruang untuk optimalisasi teknis lebih lanjut pada sistem yang digunakan. Secara umum, tingginya perolehan nilai rata-rata pada seluruh indikator variabel X2 ini mengonfirmasi bahwa integrasi teknologi informasi dalam lingkungan kerja telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi operasional organisasi.

5.4.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)

Analisis deskriptif pada variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diukur dengan menggunakan 5 indikator dengan 15 pernyataan, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.14 Statistik Deskriptif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator	Item	SS	S	N	TS	STS	Rata-Rata Indikator
Lingkungan Pengendalian	X3.1	43	45	2	0	0	4,46
	X3.2	46	41	3	0	0	4,48
	X3.3	44	42	4	0	0	4,44
Penilaian Resiko	X3.4	51	39	0	0	0	4,57
	X3.5	54	36	0	0	0	4,60
	X3.6	48	39	3	0	0	4,50

Indikator	Item	SS	S	N	TS	STS	Rata-Rata Indikator
Kegiatan Pengendalian	X3.7	51	39	0	0	0	4,57
	X3.8	51	39	0	0	0	4,57
	X3.9	60	30	0	0	0	4,67
Informasi dan Komunikasi	X3.10	51	33	6	0	0	4,50
	X3.11	38	45	7	0	0	4,34
	X3.12	44	43	3	0	0	4,46
Pemantauan	X3.13	47	40	3	0	0	4,49
	X3.14	49	41	0	0	0	4,54
	X3.15	42	40	8	0	0	4,38

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan tabel 5.14 yang menunjukkan hasil penilaian responden terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) yang diukur melalui 15 pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut mencakup lima indikator utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Secara umum, responden memberikan penilaian yang sangat baik, dengan nilai rata-rata per indikator berkisar antara 4,34 hingga 4,67. Nilai tertinggi ada pada bagian kegiatan pengendalian, tepatnya pada poin X3.9 dengan rata-rata 4,67, yang menunjukkan bahwa aturan dan prosedur kerja di dalam organisasi sudah berjalan dengan baik.

Selain itu, organisasi ini juga dinilai sudah sangat baik dalam menangani risiko kerja, seperti terlihat pada poin X3.5 yang memiliki rata-rata 4,60. Meskipun secara keseluruhan nilainya tinggi, terdapat satu poin pada bagian informasi dan komunikasi (X3.11) yang memiliki nilai rata-rata paling rendah yaitu 4,34. Namun, angka tersebut tetap tergolong sangat bagus dan tidak merusak penilaian umum. Secara ringkas, hasil ini membuktikan bahwa sistem pengawasan internal sudah

diterapkan dengan sangat kuat dan membantu organisasi bekerja dengan lebih tertib serta bertanggung jawab.

5.4.4 Kondisi Keuangan (Y)

Analisis deskriptif pada variabel Kondisi Keuangan diukur dengan menggunakan 12 indikator dengan 36 pernyataan, yang didistribusikan dengan frekuensi jawaban responden pada tiap indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.15 Statistik Deskriptif Kondisi Keuangan

Indikator	Item	SS	S	N	TS	STS	Rata-Rata Indikator
Kebutuhan Masyarakat	Y.1	7	36	46	1	0	3,54
	Y.2	4	42	40	4	0	3,51
	Y.3	9	40	40	1	0	3,63
Populasi	Y.4	6	44	40	0	0	3,62
	Y.5	8	40	39	3	0	3,59
	Y.6	4	49	36	1	0	3,62
Nilai Properti	Y.7	3	49	31	7	0	3,53
	Y.8	7	50	32	1	0	3,70
	Y.9	4	43	43	0	0	3,57
Inflasi	Y.10	7	38	44	1	0	3,57
	Y.11	6	35	44	5	0	3,47
	Y.12	9	35	44	2	0	3,57
Pendapatan Individu	Y.13	3	47	37	3	0	3,56
	Y.14	3	41	44	2	0	3,50
	Y.15	7	40	43	0	0	3,60
Pengangguran	Y.16	9	43	28	10	0	3,57
	Y.17	11	40	36	3	0	3,66
	Y.18	8	40	41	1	0	3,61

Indikator	Item	SS	S	N	TS	STS	Rata-Rata Indikator
Ketersediaan Anggaran	Y.19	2	36	49	3	0	3,41
	Y.20	4	37	44	5	0	3,44
	Y.21	11	32	43	4	0	3,56
Ketepatan Waktu dan Akurasi Transaksi Keuangan	Y.22	7	43	38	2	0	3,61
	Y.23	7	40	41	2	0	3,58
	Y.24	9	42	36	3	0	3,63
Kualitas dan Ketepatan Pelaporan	Y.25	4	41	38	7	0	3,47
	Y.26	7	40	41	2	0	3,58
	Y.27	10	35	43	2	0	3,59
Balasan Hutang	Y.28	6	44	36	4	0	3,58
	Y.29	8	32	42	8	0	3,44
	Y.30	4	40	41	5	0	3,48
Potensi Pajak	Y.31	7	39	40	4	0	3,54
	Y.32	8	40	36	6	0	3,56
	Y.33	6	44	36	4	0	3,58
Legalitas Pengeluaran	Y.34	7	37	40	6	0	3,50
	Y.35	6	35	44	5	0	3,47
	Y.36	8	39	35	8	0	3,52

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 5.15, secara umum responden memberikan tanggapan yang positif terhadap variabel Kondisi Keuangan. Hal ini tercermin dari distribusi jawaban yang didominasi oleh kategori "Setuju" dan "Netral", serta tidak adanya responden yang memilih kategori "Sangat Tidak Setuju" untuk seluruh item pernyataan yang diajukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator-indikator keuangan yang diukur telah berjalan dengan cukup stabil dan sesuai dengan harapan di lapangan.

Pencapaian skor tertinggi terdapat pada indikator Nilai Properti (item Y.8) dengan rata-rata sebesar 3,70, yang menandakan bahwa responden memandang aspek nilai aset atau properti sebagai kekuatan utama dalam kondisi keuangan saat ini. Di sisi lain, meskipun indikator Ketersediaan Anggaran (item Y.19) mencatatkan skor rata-rata terendah yaitu 3,41, nilai tersebut tetap dikategorikan baik karena masih berada di atas nilai tengah skala penilaian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengelolaan anggaran sudah berjalan cukup baik, aspek ini tetap memerlukan perhatian atau evaluasi lebih lanjut dibandingkan indikator lainnya agar kinerjanya semakin optimal.

Secara keseluruhan, rata-rata skor indikator yang berada pada rentang 3,41 hingga 3,70 menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan berada dalam kategori yang sehat dan konsisten. Keseragaman persepsi responden ini memberikan bukti kuat bahwa setiap dimensi keuangan telah terimplementasi dengan baik dan saling mendukung dalam menciptakan kondisi keuangan secara menyeluruh.

5.4.5 Budaya Lokal (Z)

Analisis deskriptif pada variabel moderasi yaitu Budaya Lokal dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik jawaban responden terhadap instrumen penelitian yang digunakan. Variabel Budaya Lokal dalam penelitian ini diukur melalui 4 indikator utama yang dijabarkan ke dalam 12 pernyataan. Setiap pernyataan disusun untuk merefleksikan nilai-nilai, norma, serta praktik budaya yang berkembang dalam lingkungan pemerintahan daerah. Jawaban responden pada tiap indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.16 Statistik Deskriptif Budaya Lokal

Indikator	Item	SS	S	N	TS	STS	Rata-Rata Indikator
Pomae-maeka (saling menghormati)	Z.1	11	37	38	4	0	3,61
	Z.2	12	20	53	5	0	3,43
	Z.3	7	38	38	7	0	3,50
Popia-piara (saling memelihara)	Z.4	13	36	41	0	0	3,69
	Z.5	10	41	28	11	0	3,56
	Z.6	10	39	27	14	0	3,50
Pomaa-Maasiaka (saling menyayangi)	Z.7	7	41	40	2	0	3,59
	Z.8	9	46	24	11	0	3,59
	Z.9	13	35	38	4	0	3,63
Poangka angkataka (saling menghargai)	Z.10	12	20	53	5	0	3,43
	Z.11	5	40	38	7	0	3,48
	Z.12	12	40	38	0	0	3,71

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan tabel 5.16 yang menyajikan data mengenai persepsi responden terhadap penerapan nilai-nilai Budaya Lokal yang mencakup empat indikator utama, yaitu Pomae-maeka (saling menghormati), Popia-piara (saling memelihara), Pomaa-Maasiaka (saling menyayangi), dan Poangka angkataka (saling menghargai). Secara umum, masyarakat memberikan respons yang positif terhadap keberadaan nilai-nilai budaya ini, di mana mayoritas jawaban terfokus pada kategori Netral (N) dan Setuju (S).

Jika meninjau lebih dalam, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator Poangka angkataka (saling menghargai) khususnya pada item Z.12 dengan skor 3,71. Hal ini menunjukkan bahwa sikap saling menghargai merupakan nilai budaya yang paling kuat dirasakan implementasinya di lapangan. Selain itu, indikator Popia-piara (saling memelihara) pada item Z.4 juga mencatat angka yang cukup tinggi sebesar 3,69, yang mempertegas bahwa kepedulian antar sesama masih menjadi fondasi sosial yang kokoh di lokasi penelitian.

Meskipun secara keseluruhan berada pada kategori positif, terdapat skor rata-rata terendah sebesar 3,43 pada butir pernyataan Z.2 (indikator Pomae-maeka) dan Z.10 (indikator Poangka angkataka). Walaupun perolehan angka tersebut masih melampaui nilai tengah (skala 3,00) yang berarti berada dalam kategori "Baik", dominansi jawaban pada kategori "Netral" ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk optimalisasi pemahaman dan praktik nilai-nilai tersebut di masyarakat. Berdasarkan rentang rata-rata keseluruhan yang berada pada angka 3,43 hingga 3,71, dapat disimpulkan bahwa budaya lokal tetap berkembang dan dijalankan secara konsisten sebagai identitas sosial masyarakat setempat.

5.5 Uji Hipotesis

5.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian linear berganda tanpa variabel moderasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.17 Uji Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.681	.670	4.21530
a. Predictors: (Constant), SPIP, Pemanfaatan TI, Kompetensi SDM				

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan Tabel 5.17 Uji Summary, Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,825 mencerminkan tingkat hubungan simultan antara seluruh variabel independen, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap variabel

dependen yaitu kondisi keuangan. Nilai R yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk bersifat positif dan sangat kuat.

Nilai R Square dalam penelitian ini sebesar 0,681 yang menunjukkan bahwa 68,1% variasi pada variabel dependen mampu dijelaskan secara simultan oleh ketiga variabel independen yang digunakan dalam model penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang dibangun memiliki daya jelas yang kuat, sehingga variabel-variabel independen tersebut berperan penting dalam memengaruhi perubahan pada variabel dependen. Sementara itu, sisanya sebesar 31,9% variasi pada variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5.18 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	80.120	15.250		5.253	.000
Kompetensi SDM (X1)	.850	.120	.410	7.083	.000
Pemanfaatan TI (X2)	.420	.115	.305	3.652	.001
SPIP (X3)	.380	.130	.245	2.923	.004

a. Dependent Variable : Y (Kondisi Keuangan)

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan Tabel 5.18, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 80,120. Nilai ini dapat diartikan bahwa apabila kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP bernilai nol, maka kondisi keuangan berada pada nilai sebesar 80,120 satuan.

Variabel Kompetensi SDM (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,850 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi

SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan. Artinya, setiap peningkatan satu satuan kompetensi SDM akan meningkatkan kondisi keuangan sebesar 0,850 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,420 dan nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan. Dengan demikian, semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, maka kondisi keuangan akan semakin meningkat. Selanjutnya, variabel SPIP (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,380 dengan nilai signifikansi 0,004 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, maka persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 80,120 + 0,850X_1 + 0,420X_2 + 0,380X_3$$

Keterangan:

- Y = Kondisi Keuangan
- X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia
- X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- X_3 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

5.5.1.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kondisi Keuangan

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,850 dan tingkat signifikansi 0,000, yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Temuan

ini mengindikasikan bahwa kompetensi SDM merupakan salah satu faktor utama yang menentukan baik atau buruknya kondisi keuangan.

Pengaruh positif tersebut mencerminkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur pengelola keuangan, maka semakin baik pula kondisi keuangan yang dihasilkan. Aparatur yang kompeten cenderung mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, serta menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Lebih lanjut, nilai Standardized Coefficients (Beta) sebesar 0,410 menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh yang relatif lebih dominan dibandingkan variabel independen lainnya dalam model penelitian ini. Dominasi pengaruh tersebut menegaskan bahwa meskipun pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan SPIP merupakan faktor penting, keberhasilan pengelolaan keuangan tetap sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Tanpa kompetensi yang memadai, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern tidak dapat berjalan secara optimal.

5.5.1.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kondisi Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 5.18, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,420 dengan nilai signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan. Pengaruh positif tersebut mengindikasikan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, maka kondisi keuangan akan semakin baik.

Teknologi informasi berperan sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi mampu mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses pengolahan data, serta meningkatkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan. Selain itu, teknologi informasi juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, data keuangan dapat diakses dan dipantau secara lebih mudah oleh pihak-pihak terkait, sehingga potensi terjadinya penyimpangan atau manipulasi dapat diminimalkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan dapat diterima.

5.5.1.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kondisi Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki koefisien regresi sebesar 0,380 dengan nilai signifikansi 0,004, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan.

SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, khususnya dalam hal keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Penerapan SPIP yang efektif mampu meminimalkan risiko kesalahan, kecurangan, dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Lebih lanjut, SPIP mencakup unsur-unsur penting seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Apabila unsur-unsur tersebut diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, maka proses pengelolaan keuangan dapat berjalan secara terstruktur dan terkendali. Hal ini berdampak pada meningkatnya ketertiban administrasi, ketepatan pencatatan, serta kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya memperbaiki kondisi keuangan.

5.5.2 Uji *Moderated Regression Analysis*

Hasil pengujian variabel dengan menggunakan variabel moderasi atau disebut pengujian regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.19 Uji Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.764	3.15020
a. Predictors: (Constant), SPIP*Budaya Lokal, Kompetensi SDM, SPIP, Pemanfaatan TI, Kompetensi SDM*Budaya Lokal, Pemanfaatan TI*Budaya Lokal, Budaya Lokal				

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan Tabel 5.19 Uji Summary, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,885, yang menunjukkan adanya hubungan sangat kuat dan positif antara seluruh variabel independen dalam model penelitian dengan variabel dependen. Variabel independen tersebut meliputi kompetensi sumber daya

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, serta budaya lokal sebagai variabel moderasi.

Selanjutnya, nilai R Square sebesar 0,783 mengindikasikan bahwa sebesar 78,3% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh seluruh variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya jelas yang tinggi dalam menerangkan perubahan variabel dependen. Sementara itu, sisanya sebesar 21,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5.20 Hasil Analisis Regresi Moderasi

Coefficiens ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (<i>Constant</i>)	65.210	12.450		5.237	.000
Kompetensi SDM	.720	.110	.350	6.545	.000
Pemanfaatan TI	.380	.105	.280	3.619	.001
SPIP	.310	.115	.215	2.695	.008
Budaya Lokal	.450	.095	.290	4.736	.000
Kompetensi SDM*Budaya Lokal	.215	.065	.185	3.307	.001
Pemanfaatan TI*Budaya Lokal	.198	.070	.160	2.828	.006
SPIP*Budaya Lokal	.240	.075	.195	3.200	.002

a Dependent Variabel : Kondisi Keuangan

Sumber: Hasil olah data, 2025

5.5.2.1 Budaya Lokal Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kondisi Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi pada Tabel 5.20, interaksi antara Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Budaya Lokal sebagai

variabel moderasi ditunjukkan oleh variabel Kompetensi SDM $\times$ Budaya Lokal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel interaksi tersebut memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,215 dengan tingkat signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal secara signifikan memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kondisi keuangan.

Nilai koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa budaya lokal memperkuat pengaruh kompetensi SDM terhadap kondisi keuangan. Artinya, semakin kuat nilai-nilai budaya lokal yang dianut dalam organisasi, maka pengaruh kompetensi SDM terhadap kondisi keuangan akan semakin besar. Budaya lokal berperan sebagai kerangka nilai yang membentuk sikap dan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan. Aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan pengetahuan yang memadai, namun tidak didukung oleh nilai budaya yang kuat, berpotensi belum mampu mengoptimalkan kinerjanya. Sebaliknya, ketika kompetensi SDM dipadukan dengan budaya lokal yang positif, maka proses pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih disiplin, transparan, dan akuntabel, sehingga berdampak pada perbaikan kondisi keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa budaya lokal berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kompetensi SDM dan kondisi keuangan.

5.5.2.2 Budaya Lokal Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kondisi Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian regresi moderasi pada Tabel 5.20, variabel interaksi antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Budaya Lokal (Pemanfaatan TI $\times$ Budaya Lokal) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar

0,198 dengan tingkat signifikansi 0,006, yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa budaya lokal memiliki peran moderasi yang signifikan dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kondisi keuangan.

Koefisien interaksi yang bernilai positif menunjukkan bahwa keberadaan budaya lokal mampu mengoptimalkan dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan hasil yang lebih efektif apabila diterapkan dalam lingkungan kerja yang menjunjung nilai-nilai lokal, seperti kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab kolektif, serta etika dalam penggunaan sistem informasi. Dengan adanya nilai budaya tersebut, teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya lokal memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi keuangan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya peran moderasi budaya lokal dalam hubungan tersebut dapat diterima.

5.5.2.3 Budaya Lokal Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kondisi Keuangan

Hasil pengujian regresi moderasi yang disajikan pada Tabel 5.20 menunjukkan bahwa variabel interaksi antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Budaya Lokal memiliki koefisien regresi sebesar 0,240 dengan nilai signifikansi 0,002, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa budaya lokal terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam hubungan antara SPIP dan kondisi keuangan.

Efektivitas penerapan SPIP dalam meningkatkan kondisi keuangan akan semakin kuat apabila didukung oleh budaya lokal yang kondusif.

Budaya lokal berperan dalam membentuk sikap dan perilaku aparatur agar lebih patuh terhadap mekanisme pengendalian, memiliki kesadaran pengawasan yang tinggi, serta menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya lokal memperkuat pengaruh SPIP terhadap kondisi keuangan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya peran moderasi budaya lokal dalam hubungan tersebut dapat diterima.

Berdasarkan Pengujian hipotesis yang dilakukan maka kesimpulan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.21 Hasil Penelitian

	Hipotesis	Hasil
H1	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan.	Diterima
H2	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan.	Diterima
H3	Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan.	Diterima
H4	Budaya lokal mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kondisi keuangan.	Diterima
H5	Budaya lokal mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi keuangan.	Diterima
H6	Budaya lokal mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kondisi keuangan.	Diterima

BAB VI

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis 1 sampai hipotesis 6 akan dijelaskan dalam bab pembahasan ini. Pembahasan tersebut dikaitkan dengan teori teori yang melandasi, rasionalitas dari hasil pengujian hipotesis-hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, dan hubungannya dengan riset-riset terdahulu.

6.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, yang secara langsung mencerminkan tingkat kesehatan keuangan daerah tersebut. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,850 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur pengelola keuangan, maka kondisi keuangan pemerintah daerah cenderung semakin sehat, stabil, dan terkendali.

Secara rasional, pengaruh positif ini menunjukkan bahwa aparatur yang kompeten mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga berkontribusi langsung terhadap terciptanya kondisi keuangan yang sehat. Kompetensi tersebut tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pemahaman regulasi, kemampuan teknis dalam perencanaan hingga pelaporan, serta keterampilan dalam memanfaatkan sistem keuangan. Dengan kompetensi yang baik, kesalahan administrasi dapat diminimalkan, ketepatan waktu pelaporan meningkat, serta kepatuhan terhadap standar

akuntansi terjaga, yang pada akhirnya memperkuat indikator kesehatan keuangan daerah.

Temuan ini selaras dengan Teori *Stakeholder* yang menekankan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjaga dan mempertanggungjawabkan kondisi keuangannya kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kondisi keuangan daerah berada dalam kategori sehat dan dapat dipercaya, melalui penyajian informasi keuangan yang andal, transparan, dan relevan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Gaspersz (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memungkinkan individu bekerja secara efektif. Dalam pengelolaan keuangan daerah, kompetensi aparatur menjadi fondasi utama dalam menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah, sebagaimana ditegaskan oleh Nirwana (2015) bahwa kondisi keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban serta menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang.

Lebih lanjut, nilai *Standardized Coefficients* (Beta) sebesar 0,410 menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang relatif dominan dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang sehat tidak hanya ditentukan oleh sistem atau teknologi, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Tanpa kompetensi yang memadai, kondisi keuangan berisiko menjadi kurang sehat meskipun didukung oleh sistem yang baik.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan empiris dari berbagai penelitian terdahulu, seperti Sukmaningtyas (2017), Jatmiko et al. (2020), Puspita dan Virginia (2022), Christina et al., (2022), serta Amanda et al., (2024), yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi keuangan daerah dan menjadi sarana utama akuntabilitas pemerintah kepada para stakeholder.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kondisi keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada penguatan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kemampuan teknis, serta penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya. Upaya ini penting tidak hanya untuk memperbaiki kinerja keuangan, tetapi juga untuk memenuhi harapan dan kepentingan seluruh *stakeholder* terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

6.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Temuan ini didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,420 dengan tingkat signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin optimal teknologi informasi

dimanfaatkan dalam proses pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kondisi keuangan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah.

Pengaruh positif ini mencerminkan peran strategis teknologi informasi sebagai instrumen pendukung dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi memungkinkan seluruh proses pengelolaan keuangan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan—dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Dengan sistem informasi keuangan berbasis teknologi, kesalahan pencatatan dapat diminimalkan, duplikasi data dapat dihindari, serta informasi keuangan tersedia secara tepat waktu. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan efisiensi anggaran dan akuntabilitas fiskal, yang pada akhirnya memperkuat kesehatan kondisi keuangan daerah.

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori pemanfaatan teknologi informasi yang dikemukakan oleh Warsita (2018), yang menyatakan bahwa teknologi informasi memberikan nilai tambah bagi organisasi apabila digunakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan proses kerja organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, teknologi informasi berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih rasional dan berbasis data. Pemanfaatan teknologi yang optimal membantu aparatur dalam memonitor realisasi anggaran, mengelola aset, serta mengevaluasi kinerja keuangan secara berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan kondisi keuangannya.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini selaras dengan Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean (*DeLone and McLean Information System Success Model*) yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003), yang menyatakan

bahwa keberhasilan sistem informasi ditentukan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat penggunaan, kepuasan pengguna, serta manfaat bersih (net benefits) yang dihasilkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi keuangan yang memiliki kualitas sistem dan kualitas informasi yang baik akan mendorong tingkat penggunaan yang tinggi oleh aparatur. Informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu akan meningkatkan kepuasan pengguna dan menghasilkan manfaat nyata berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya tercermin dalam kondisi keuangan daerah yang lebih baik.

Dari perspektif Teori *Stakeholder*, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan. Fontaine et al., (2006) menegaskan bahwa organisasi publik memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* melalui penyediaan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan yang lebih terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, serta pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan pandangan Hendrick dan Probohudono (2023) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, sehingga berdampak positif terhadap persepsi *stakeholder* terhadap kesehatan keuangan daerah. Teknologi informasi juga membantu pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan regulasi dan standar pelaporan keuangan yang semakin ketat, yang merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu, seperti Puspita dan Virginia (2022), Loe Mau et al., (2023), Amanda Yulia et al., (2024), serta Kuras Purba et al., (2024) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama kondisi keuangan daerah yang sehat dan menjadi wujud akuntabilitas pemerintah daerah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan elemen penting dalam mendorong terciptanya kondisi keuangan pemerintah daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi keuangan, meningkatkan infrastruktur teknologi, serta memastikan bahwa teknologi yang tersedia dimanfaatkan secara konsisten. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan *stakeholder* terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan modern.

6.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,380 dengan tingkat signifikansi 0,002. Temuan ini menegaskan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Pengaruh positif SPIP terhadap kondisi keuangan menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengendalian intern yang memadai berperan penting dalam

menjaga ketertiban, keandalan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SPIP menjadi instrumen yang memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengendalian yang efektif, risiko kesalahan, penyimpangan, dan pemborosan anggaran dapat diminimalkan, sehingga stabilitas dan kesehatan keuangan daerah dapat terjaga secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan teori pengendalian intern yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. COSO mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh pimpinan dan seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya terkait efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, konsep ini diadopsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa SPIP merupakan proses integral yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin tercapainya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan tertib.

Efektivitas SPIP memungkinkan pemerintah daerah memiliki mekanisme pengawasan yang memadai terhadap penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah. Unsur-unsur SPIP, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, saling berinteraksi untuk menciptakan sistem kerja yang terstruktur dan terkendali. Dengan sistem pengendalian intern yang kuat, pemerintah daerah mampu mendeteksi potensi permasalahan sejak dini serta melakukan tindakan korektif

secara tepat, sehingga kondisi keuangan daerah dapat dikelola secara lebih hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal.

Dari perspektif Teori *Stakeholder*, penerapan SPIP yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan. Teori *stakeholder* menekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada pimpinan internal, tetapi juga kepada masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, dan pemerintah pusat. SPIP berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepentingan *stakeholder* dapat terlindungi. Melalui pengendalian intern yang baik, pemerintah daerah mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap kinerja keuangan dan tata kelola pemerintahan.

Penerapan SPIP yang konsisten juga mendukung terciptanya informasi keuangan yang andal dan relevan. Informasi keuangan yang berkualitas menjadi dasar penting bagi *stakeholder* dalam menilai kondisi keuangan daerah dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Dengan demikian, SPIP tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan empiris dari berbagai penelitian terdahulu, seperti Jatmiko et al., (2020), Hendrick dan Probohudono (2023), serta Hirawan dan Widarjo (2025) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan

yang baik mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sehat dan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan SPIP.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan pilar penting dalam mewujudkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat penerapan SPIP melalui peningkatan komitmen pimpinan, penguatan budaya pengendalian, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami dan menjalankan fungsi pengendalian intern. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sekaligus memenuhi harapan para *stakeholder* terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

6.4 Budaya Lokal Memperkuat Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis moderasi menunjukkan bahwa budaya lokal Buton berperan signifikan dalam memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien interaksi Kompetensi SDM $\times$ Budaya Lokal sebesar 0,215 dengan nilai *t* sebesar 3,307 dan tingkat signifikansi 0,001 ($< 0,05$). Temuan ini menegaskan bahwa kompetensi aparatur tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi lebih efektif ketika diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal yang hidup dalam lingkungan birokrasi. Dengan kata lain, budaya lokal Buton berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat kontribusi kompetensi dalam mewujudkan kondisi keuangan daerah yang sehat.

Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa aparatur yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih optimal dalam mengelola keuangan daerah ketika

perilakunya dibingkai oleh nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks Buton, budaya tidak sekadar menjadi identitas sosial, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etis yang mengarahkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak aparatur. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter kerja yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga kompetensi yang dimiliki tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terimplementasi dalam praktik pengelolaan keuangan yang berintegritas dan berorientasi pada kesehatan keuangan daerah.

Kekuatan moderasi ini sangat terlihat dalam falsafah *Bhinci-Bhinciki Kuli* yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Buton. Nilai-nilai seperti *Pomae-maeka* (saling menghormati), *Popia-piara* (saling memelihara), *Pomaa-maasiaka* (saling menyayangi), dan *Poangka-angkataka* (saling menghargai) membentuk hubungan kerja yang harmonis serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif di antara aparatur. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, nilai-nilai ini memperkuat komitmen moral aparatur untuk bekerja secara amanah dan profesional. Dengan demikian, budaya lokal tidak hanya melengkapi kompetensi, tetapi juga memastikan bahwa kompetensi tersebut digunakan untuk menjaga kondisi keuangan daerah tetap sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat (2009) yang menempatkan budaya sebagai sistem nilai yang mengarahkan perilaku individu dalam organisasi. Dalam hal ini, budaya lokal Buton berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang memperkuat pengendalian formal seperti regulasi dan sistem pengendalian intern. Ketika nilai-nilai budaya menekankan kejujuran, kebersamaan, dan tanggung jawab, maka aparatur yang kompeten akan terdorong untuk mengelola keuangan daerah secara lebih hati-hati dan berorientasi pada kesehatan fiskal jangka panjang.

Secara konseptual, budaya lokal Buton berperan sebagai penguat (moderator) yang menjembatani antara kompetensi individu dan kinerja keuangan organisasi. Kompetensi yang tinggi tidak akan memberikan hasil optimal tanpa dukungan nilai-nilai budaya yang mendorong penerapan secara konsisten. Dalam hal ini, budaya lokal memastikan bahwa kompetensi tidak hanya dimiliki, tetapi juga diinternalisasi dalam tindakan nyata, sehingga pengelolaan keuangan daerah mampu berjalan secara efektif dan menghasilkan kondisi keuangan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nirwana (2015) dan Mutawally (2023) yang menunjukkan bahwa modal budaya memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara sumber daya manusia dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Budaya lokal mampu meningkatkan efektivitas peran aparatur dalam mengelola keuangan melalui pembentukan etos kerja, disiplin, dan rasa tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, budaya lokal tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi secara sinergis dengan kompetensi sumber daya manusia dalam membentuk kondisi keuangan daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya lokal merupakan faktor kontekstual yang memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya lokal dalam sistem kerja birokrasi, baik melalui keteladanan pimpinan, pembinaan aparatur, maupun integrasi nilai budaya dalam kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan. Upaya ini penting agar kompetensi aparatur tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai budaya yang mendukung tata

kelola keuangan daerah yang akuntabel, beretika, dan berorientasi pada kepentingan *stakeholder*.

6.5 Budaya Lokal Memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kondisi Keuangan

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa interaksi antara pemanfaatan teknologi informasi dan budaya lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien interaksi Pemanfaatan TI $\times$ Budaya Lokal = 0,198 dengan nilai t sebesar 2,828 dan signifikansi $0,006 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa budaya lokal secara statistik memperkuat efek pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kondisi keuangan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat budaya lokal yang positif dalam organisasi pemerintah daerah, semakin besar pula kontribusi pemanfaatan teknologi informasi terhadap perbaikan kondisi keuangan.

Secara konseptual, fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif budaya lokal yang memandang budaya sebagai sistem nilai dan norma yang membentuk perilaku individu dalam organisasi. Dalam masyarakat Buton, budaya lokal tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan cara kerja aparatur pemerintah. Nilai-nilai tersebut mendorong aparatur untuk memanfaatkan teknologi informasi tidak sekadar sebagai alat administratif, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab, efektif, dan berorientasi pada kesehatan keuangan daerah.

Dalam praktiknya, nilai-nilai kearifan lokal Buton seperti kebersamaan, saling menghargai, dan tanggung jawab kolektif berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pemanfaatan teknologi. Ketika teknologi informasi

digunakan dalam suasana budaya yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, maka sistem informasi keuangan tidak hanya menghasilkan data yang cepat dan akurat, tetapi juga dapat dipercaya. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas keputusan keuangan dan menjaga kondisi keuangan daerah tetap stabil dan berkelanjutan.

Pandangan ini sejalan dengan Teori *Stakeholder*, yang menekankan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan harapan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Budaya lokal mencerminkan harapan masyarakat setempat, yang menginginkan aparatur tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga bersikap responsif terhadap kebutuhan sosial dan budaya mereka. Ketika pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan dalam konteks budaya lokal yang menghargai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, maka informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan mudah dipahami oleh *stakeholder*, sehingga meningkatkan legitimasi pemerintah daerah di hadapan masyarakat, DPRD, dan lembaga pengawas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan empiris sejumlah penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa budaya lokal memiliki peran strategis dalam memperkuat efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Nurmandi dan Kim (2015) menemukan bahwa nilai-nilai budaya lokal dan norma sosial masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) di sektor publik. Temuan tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan manfaat yang optimal apabila diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks budaya lokal yang membentuk perilaku aparatur dan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Haryanto dan Nugroho (2019) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif terbukti dapat memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam menghasilkan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, budaya lokal berfungsi sebagai faktor penguat yang menjembatani hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan kondisi keuangan daerah, sehingga teknologi tidak hanya berperan sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola keuangan yang berlandaskan nilai-nilai lokal.

6.6 Budaya Lokal Memperkuat Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kondisi Keuangan

Hasil uji regresi moderasi menunjukkan bahwa budaya lokal terbukti memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien interaksi SPIP $\times$ Budaya Lokal sebesar 0,240, dengan nilai t sebesar 3,200 dan tingkat signifikansi 0,002, yang lebih kecil dari 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penerapan SPIP dalam meningkatkan kondisi keuangan daerah menjadi lebih kuat apabila didukung oleh nilai-nilai budaya lokal yang positif. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa budaya lokal memperkuat pengaruh SPIP terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dapat diterima secara empiris.

Dalam konteks pemerintah daerah, keberadaan budaya lokal yang kuat turut memperkuat internalisasi unsur-unsur SPIP, seperti lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta pemantauan. Aparatur yang bekerja dalam lingkungan budaya yang menjunjung tinggi etika dan integritas cenderung lebih patuh terhadap prosedur pengendalian, lebih peka terhadap potensi risiko penyimpangan, dan lebih konsisten dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan demikian, budaya lokal berfungsi sebagai pengendali informal yang melengkapi sistem pengendalian intern formal, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan menjaga stabilitas kondisi keuangan daerah.

Pembahasan ini sejalan dengan teori budaya lokal yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2009), yang menyatakan bahwa budaya merupakan sistem nilai yang mengarahkan cara berpikir dan bertindak individu dalam organisasi dan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah, budaya lokal berperan sebagai pedoman moral yang membentuk sikap aparatur dalam menerapkan pengendalian intern. Ketika nilai-nilai budaya mendukung kedisiplinan dan tanggung jawab kolektif, pelaksanaan SPIP akan berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kondisi keuangan pemerintah daerah.

Ditinjau dari perspektif Teori *Stakeholder*, penguatan SPIP melalui budaya lokal mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Budaya lokal yang menjunjung nilai kejujuran dan keterbukaan mendorong aparatur untuk melaksanakan SPIP secara konsisten, sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan serta memperkuat kepercayaan *stakeholder* terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, budaya lokal berperan sebagai faktor kontekstual yang memperkuat hubungan antara sistem pengendalian intern dan kondisi keuangan pemerintah daerah. SPIP menyediakan kerangka kerja pengendalian yang bersifat

formal, sementara budaya lokal memastikan bahwa kerangka tersebut dijalankan dengan integritas, kedisiplinan, dan komitmen moral. Sinergi antara keduanya mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan daerah, dan hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis tersebut diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memadai mampu mengelola keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak pada ketertiban pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran yang realistis, serta keberlanjutan kondisi keuangan daerah.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan daerah, dan hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis tersebut diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan keandalan informasi keuangan, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan kondisi keuangan daerah.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi keuangan daerah, dan hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis tersebut diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan SPIP yang efektif mampu

meningkatkan pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah, meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan, serta meningkatkan keandalan pelaporan keuangan yang berdampak pada kondisi keuangan daerah.

4. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya lokal memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kondisi keuangan daerah terbukti diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kondisi keuangan daerah apabila didukung oleh budaya lokal yang positif, yang mendorong penerapan kompetensi secara konsisten dan bertanggung jawab.
5. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya lokal memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi keuangan daerah terbukti diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah menghasilkan manfaat yang lebih besar ketika diterapkan dalam lingkungan budaya yang mendukung perilaku kerja yang berorientasi pada kepentingan publik.
6. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya lokal memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kondisi keuangan daerah terbukti diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan kondisi keuangan daerah apabila didukung oleh budaya lokal yang menanamkan nilai integritas, kepatuhan, dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah. Ketiga faktor tersebut terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel tersebut menjadi lebih kuat dan efektif ketika didukung oleh budaya lokal yang positif, yang berperan sebagai variabel moderasi dalam membentuk perilaku aparatur dan pola kerja organisasi pemerintah daerah.

7.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan pada hasil temuan dari penelitian dapat dinyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Budaya Lokal merupakan variabel penting dalam rangka peningkatan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Pulau Buton. Dengan analisis terintegrasi tersebut, maka temuan penelitian mampu memberikan implikasi teoritis yang lebih komprehensif dalam pengembangan keilmuan dan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pengelolaan keuangan sektor publik dengan menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan determinan penting dalam memengaruhi kondisi keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian dengan mengintegrasikan budaya lokal sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor internal organisasi dan kondisi keuangan pemerintah daerah. Temuan ini memperkuat

pandangan bahwa faktor sosial dan kultural memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan publik.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah bahwa upaya peningkatan kondisi keuangan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilaksanakan secara terpadu. Peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan penerapan SPIP perlu diintegrasikan dengan pengembangan budaya lokal yang mendukung tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada penyempurnaan aspek teknis dan prosedural, tetapi juga memperhatikan pembentukan nilai dan perilaku kerja aparatur agar sistem dan kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Pada bagian akhir pembahasan ini dikemukakan beberapa keterbatasan penelitian yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman pengembangan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Disadari bahwa penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan terutama berkenaan dengan aspek metodologis, waktu, dan biaya sebagai berikut:

1. Peneliti hanya menggunakan 5 variabel yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Budaya Lokal, dan Kondisi Keuangan Daerah. Sementara itu, faktor eksternal lainnya yang mungkin turut memengaruhi kondisi keuangan daerah belum dimasukkan dalam model penelitian ini.

2. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya dilaksanakan di tiga kabupaten dengan 10 OPD di setiap kabupaten sebagai sampel penelitian, sehingga belum mencakup seluruh wilayah administratif di Pulau Buton. Keterbatasan ini disebabkan oleh kendala waktu dan biaya yang dihadapi peneliti. Oleh karena itu, hasil penelitian ini kemungkinan belum sepenuhnya merepresentasikan karakteristik atau fenomena secara menyeluruh di seluruh wilayah Pulau Buton. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya variasi kondisi sosial, ekonomi, maupun infrastruktur di kabupaten lain yang tidak teramati dalam penelitian ini.
3. Item-item kuesioner dalam penelitian ini sudah disederhanakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di pemerintah daerah agar lebih mudah dipahami oleh responden. Namun kekhawatiran peneliti, ada kecenderungan jawaban responden memilih nilai tengah (skor 3), karena memudahkan responden dalam menjawab kuesioner, sehingga penelitian ini tidak mampu mengontrol sepenuhnya kesungguhan, keterbukaan, serta kejujuran responden agar memilih opsi jawaban sesuai dengan keadaan dan kenyataan. Keadaan ini terjadi di luar dari kendali peneliti, karena keterbatasan waktu luang pegawai untuk mengisi kuesioner dengan berbagai alasan pekerjaan maupun alasan lainnya.

7.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah

dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah disarankan untuk dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten dan berkelanjutan guna mendukung terciptanya kondisi keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian pada pemerintah daerah lain dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, seperti wawancara mendalam atau observasi, guna meminimalkan subjektivitas responden dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, F., Damayanti, R. A., & Nirwana. (2023). Dampak Implementasi Standar Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 73–85.
- Astawa, I. P., & Sukawati, T. G. R. (2018). Local Culture, Internal Marketing and Employee Satisfaction in Improving Financial Performance: A Case Study of Microfinance Institutions in Bali. *Journal of Management and Marketing Review*, Vol. 3(2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. (2023). *Kabupaten Buton dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Buton.
- Briando, B., Ajis, M. N., Triyuwono, I., & Ludigdo, U. (2024). Human Resources Competence in State Financial Management: Malay Cultural Perspective. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 142–157.
- Chatman, J. A., Caldwell, D. F., O'Reilly, C. A., & Doerr, B. (2014). Parsing Organizational Culture: How the Norm for Adaptability Influences the Relationship between Culture Consensus and Financial Performance in High-Technology Firms. *Journal of Organizational Behavior*, 35(6), 785–808.
- Damayanti, A. Y. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Kompetensi SDM, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kabupaten Kebumen. *Journal of Creative Student Research*, 2(3), 211–224.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Ferlia, T. M., Setyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (1st ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Gasperz, J. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan*, 5(2), 40–46.
- Ghozali. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23. Semarang: *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

- Haryanto, & Nugroho, A. (2019). *Integrasi nilai kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 145–158.
- Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Kaimana. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(2), 411–424.
- Hidayat, A. R. (2025). The effect of organizational culture and organizational commitment on performance in government agencies X. *Greenation International Journal of Tourism and Management*, 2(4), 325–334.
- Hirawan, A., & Widarjo, W. (2025). The influence of SPIP maturity and SAKIP quality on the performance of local government financial management. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 9(1), 299–310.
- Hofstede, G. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada satuan kerja X. *Owner*, 7(4), 3006–3017.
- Jatmiko, B., Irawan, D., Machmuddah, Z., & Laras, T. (2020). Factors affecting regional government financial statements: Evidence from Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(2), 89.
- Jogiyanto, & Abdillah. (2009). *Konsep dan aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris*. Yogyakarta: BPFE.
- Komala, L., Pamungkas, I. B., & Rodiyana, N. (2023). Pengaruh teknologi informasi dan motivasi terhadap kinerja: Tinjauan literatur. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 716–724.
- Krisandi, Y., & Sayekti, F. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman (Factor affecting the quality of financial statements at the Regional Secretariat of Sleman Regency). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 1–17.
- Kuras, P., Simanjuntak, R. M. P., & Purba, S. (2024). Digital accounting information system implementation at BPKAD Samosir District. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 42–58.
- Kusumedi, P., & Rizal Hb, A. (2010). Analisis stakeholder dan kebijakan pembangunan KPH model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 179–193.

- Lestari, D., Kusumawati, N. P. A., & Nuratama, I. P. (2022). Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Memoderasi Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD se-Kecamatan Penebel. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 268–284.
- Loe Mau, C., Sonbay, Y. Y., Bibiana, R. P., Perseveranda, M. E., Manafe, H. A., & Man, S. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Belu. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 289–299.
- Mahendra, A., Faridah, F., & Oktarida, A. (2022). Analisis rasio kondisi keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang pada tahun 2016-2020. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(8), 952–972.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
- Masnawati. (2015). Pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 3(2), 44–57.
- Nauli, S., & Daito, A. (2024). The influence of human resource competency and utilization of information technology on the quality of regional government financial reports with internal control as a moderating variable (Study on Bekasi City Government). *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(3), 1854–1860.
- Nirwana. (2015). *Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan* (Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin). Makassar.
- Nurmandi, A., & Kim, S. (2015). *The role of local culture and social norms in the implementation of e-government in the public sector*. *International Journal of Public Sector Management*, 28(3), 207–220.
- Prasetyo, F. J., Sumantri, S. H., Sudirman, & Umiyati, S. (2024). The influence of human resource competencies on the quality of financial statements: Lessons from Indonesia. *Social Science and Humanities Journal*, 8(07), 4508–4516.
- Puspitawati, L., & Virginia, M. (2022). Human Resources Competency in the Successful of Financial Digitization and Its Impact on the Financial Statement Performance in Society 5.0. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 746–757.
- Ritonga, I. T. (2015). Developing a measure of local government's financial condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2).

- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Rulinawaty, Samboteng, L., Purwanto, A. J., Kuncoro, S., Jasrial, Tahlilie, M. H., Efendi, Y., & Karyana, A. (2024). Investigating the influence of the updated DeLone and McLean information system (IS) success model on the effectiveness of learning management system (LMS) implementation. *Cogent Education*, 11(1).
- Setyo, D., & Yandi, A. (2022). Model Kinerja Karyawan: Kompetensi, Kompensasi dan Motivasi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 1–10.
- Sudirman, Wasistiono, S., Jeddawi, M., & Kawuryan, M. W. (2024). The cultural aspects of organizations and their influence on the performance of financial management in the regional government of Jambi Province. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 248–260.
- Sujito, A., Lestari, N., & Firdaus, V. (2022). Analysis of Discipline, Organizational Culture and Public Service Performance. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 17.
- Suliyantini, L., & Kusmuriyanto, K. (2017). The Effect of Human Resources Competency and Accrual Based Government Accounting Standard Implementation on the Quality of Local Government Financial Statement with the Implementation of Internal Control System as a Mediating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 6(1), 19–26.
- Sutrisna, M., Nadirsyah, N., & Indayani, I. (2022). The effect of human resource competence, utilization of information technology, internal control systems, and application of government accounting standards on the quality of financial reporting (Study on South Aceh Government SKPK). *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 3(3), 124–134.
- Warsita, B. (2018). Kecenderungan global dan regional dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. *Jurnal Teknodik*, 10(19), 69–98.
- Welly, W. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(1), 133.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian Tesis

Makassar, 27 Oktober 2025

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara Responden
di Tempat

Dengan Hormat,

Saya, Sharaswati adalah mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang saat ini sedang melakukan penelitian ilmiah untuk kebutuhan penyusunan tesis saya yang berjudul: "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Budaya Lokal Sebagai Variabel Moderasi".

Penelitian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan studi saya dan tidak untuk tujuan lain. Oleh karena itu, saya memohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan kondisi nyata atau sebenarnya terjadi berdasarkan pernyataan-pernyataan yang tertera didalamnya. Saya menyadari permohonan ini akan mengganggu pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara, namun bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara sangat berarti bagi penelitian ini.

Demikian permohonan ini saya buat, atas kesediaan waktu dan bantuannya, saya menyampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Sharaswati

KUESIONER PENELITIAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
4. Status : ☐ Menikah ☐ Belum menikah
5. Tingkat Pendidikan : ☐ SMA/Sederajat ☐ D3 ☐ S1
☐ S2 ☐ Lainnya
6. Nama SKPD :
7. Jabatan :

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat, dan berilah tanda (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda.
2. Tidak ada jawaban benar atau salah, jawablah sesuai kondisi sebenarnya.
3. Skala jawaban menggunakan kriteria sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (X1)

a. Pengetahuan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memahami peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.					
2.	Saya mengetahui dengan jelas tanggung jawab saya dalam pengelolaan keuangan daerah.					
3.	Saya masih sering mengalami kesulitan dalam menjalankan prosedur pengelolaan keuangan daerah.					

Sumber: Gasperz, 2019.

b. Keterampilan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
4.	Saya mampu menyajikan data keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
5.	Saya belum sepenuhnya terampil menggunakan sistem informasi keuangan daerah.					
6.	Saya dapat menyelesaikan pekerjaan di bidang keuangan daerah secara tepat waktu.					

Sumber: Gasperz, 2019.

c. Sikap

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
7.	Saya melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah dengan penuh tanggung jawab.					
8.	Saya kurang memiliki inisiatif untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.					
9.	Saya menjaga kejujuran dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah.					

Sumber: Gasperz, 2019.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X2)

a. Kualitas Sistem

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Sistem informasi keuangan yang digunakan di instansi saya mudah dipahami.					
2.	Sistem informasi keuangan dapat diakses dengan cepat saat dibutuhkan dalam pekerjaan.					
3.	Sistem informasi keuangan yang digunakan masih sering mengalami gangguan teknis.					

Sumber: Rulinawaty et al., 2024.

b. Kualitas Informasi

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
4.	Informasi yang dihasilkan oleh sistem keuangan dapat dipercaya.					
5.	Informasi yang tersedia dari sistem keuangan selalu diperbarui sesuai kebutuhan.					
6.	Informasi yang dihasilkan oleh sistem keuangan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.					

Sumber: Rulinawaty et al., 2024.

c. Kualitas Layanan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
7.	Petugas pendukung sistem informasi keuangan memberikan bantuan yang memadai ketika dibutuhkan.					
8.	Respon layanan teknis terhadap permasalahan sistem informasi keuangan masih tergolong lambat.					
9.	Layanan sistem informasi keuangan mempermudah proses kerja organisasi.					

Sumber: Rulinawaty et al., 2024.

d. Tingkat Penggunaan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
10.	Saya menggunakan sistem informasi keuangan secara rutin dalam menyelesaikan pekerjaan.					
11.	Saya masih sering menyelesaikan pekerjaan keuangan tanpa memanfaatkan sistem informasi secara maksimal.					
12.	Penggunaan sistem informasi keuangan menjadi bagian penting dalam proses kerja sehari-hari.					

Sumber: Rulinawaty et al., 2024.

e. Kepuasan Pengguna

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
13.	Saya merasa puas dengan kinerja sistem informasi keuangan yang digunakan saat ini.					
14.	Penggunaan sistem informasi keuangan memudahkan saya dalam menyelesaikan pekerjaan.					
15.	Saya merasa sistem informasi keuangan belum sepenuhnya memenuhi harapan saya.					

Sumber: Rulinawaty et al., 2024.

f. Manfaat Bersih

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
16.	Penggunaan sistem informasi keuangan membantu meningkatkan efisiensi kerja saya.					
17.	Sistem informasi keuangan membantu mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data keuangan.					
18.	Pemanfaatan sistem informasi keuangan meningkatkan kepercayaan publik.					

Sumber: Rulinawaty et al., 2024.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (X3)

a. Lingkungan Pengendalian

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pimpinan di instansi saya cukup memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap aturan kerja.					
2.	Pembagian tugas di instansi saya telah ditetapkan dengan cukup jelas.					
3.	Penerapan etika kerja belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten oleh seluruh pegawai.					

Sumber: Jatmiko et al., 2020.

b. Penilaian Risiko

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
4.	Instansi saya telah melakukan identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah.					
5.	Upaya penanganan risiko dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mulai diterapkan di instansi saya.					
6.	Penilaian risiko dalam pengelolaan keuangan daerah masih belum dilakukan secara menyeluruh.					

Sumber: Jatmiko et al., 2020.

c. Kegiatan Pengendalian

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
7.	Prosedur pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
8.	Pelaksanaan kegiatan pengendalian keuangan belum selalu dilakukan secara konsisten.					
9.	Proses pemeriksaan dalam kegiatan keuangan telah berjalan dengan cukup baik.					

Sumber: Jatmiko et al., 2020.

d. Informasi dan Komunikasi

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
10.	Informasi terkait pengelolaan keuangan daerah umumnya disampaikan tepat waktu kepada pihak terkait.					
11.	Komunikasi antarbagian dalam pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.					
12.	Sistem informasi yang digunakan cukup membantu kelancaran komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah.					

Sumber: Jatmiko et al., 2020.

e. Pemantauan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
13.	Pimpinan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara berkala.					
14.	Tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.					
15.	Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.					

Sumber: Jatmiko et al., 2020.

BUDAYA LOKAL (Z)

a. Pomaе-maeka (saling menghormati)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya menghormati pendapat rekan kerja meskipun berbeda dengan pandangan saya.					
2.	Dalam kondisi tertentu sikap saling menghormati belum sepenuhnya diterapkan oleh seluruh pegawai.					
3.	Saya senantiasa menjaga sikap dalam lingkungan kerja agar tidak menyinggung perasaan rekan kerja.					

Sumber: Mutawally, 2023.

b. Popia-piara (saling memelihara)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
4.	Saya bersedia membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas.					
5.	Kerja sama antarpegawai dalam menyelesaikan pekerjaan masih belum berjalan secara optimal.					
6.	Saya merasa para pegawai saling menjaga suasana kerja yang harmonis.					

c. Pomaa-maasiaka (saling menyayangi)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
7.	Saya berusaha memperlakukan rekan kerja dengan rasa kasih sayang.					
8.	Dalam pelaksanaan pekerjaan masih terdapat pegawai yang kurang menunjukkan empati terhadap rekan kerjanya.					
9.	Interaksi kerja antarpegawai di instansi saya berlangsung dengan rukun.					

Sumber: Mutawally, 2023.

d. Poangka angkataka (saling menghargai)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
10.	Penghargaan terhadap kontribusi setiap pegawai belum sepenuhnya dirasakan secara merata.					
11.	Saya menghargai usaha rekan kerja dalam pelaksanaan tugas di instansi saya.					
12.	Saya merasa cukup dihargai dalam lingkungan kerja tempat saya bekerja.					

Sumber: Mutawally, 2023.

KONDISI KEUANGAN DAERAH (Y)

1. Dimensi Lingkungan

a. Kebutuhan Masyarakat

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Perencanaan anggaran daerah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas masyarakat.					
2.	Pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik didukung oleh sumber daya yang masih tersedia.					
3.	Keselarasannya antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi anggaran mencerminkan harmoni yang baik dalam pengelolaan keuangan.					

Sumber: Dinapolli, 2011.

b. Populasi

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
4.	Pertumbuhan jumlah penduduk memengaruhi besarnya alokasi anggaran daerah.					
5.	Perubahan jumlah penduduk menimbulkan tekanan tambahan terhadap keuangan daerah.					
6.	Kenaikan jumlah penduduk menjadi dasar dalam mengatur kualitas layanan publik.					

Sumber: Dinapolli, 2011.

c. Nilai Properti

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
7.	Perkembangan nilai properti di daerah ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.					
8.	Potensi nilai properti telah mulai diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah.					
9.	Nilai properti di beberapa wilayah belum memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan daerah.					

d. Inflasi

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
10.	Tingkat inflasi mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan.					
11.	Pemerintah daerah berupaya menyesuaikan pengelolaan anggaran terhadap perubahan tingkat inflasi.					
12.	Dampak inflasi terhadap pengeluaran daerah masih dapat dikendalikan.					

Sumber: Dinapolli, 2011.

e. Pendapatan Individu

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
13.	Tingkat pendapatan masyarakat berkontribusi terhadap kemampuan keuangan daerah.					
14.	Rendahnya pendapatan sebagian masyarakat berdampak pada keterbatasan penerimaan daerah.					
15.	Pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi pendapatan masyarakat dalam perencanaan keuangan.					

Sumber: Dinapolli, 2011.

f. Pengangguran

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
16.	Tingkat pengangguran memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.					
17.	Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengurangan tingkat pengangguran.					
18.	Upaya penurunan pengangguran di daerah ini telah mulai memberikan dampak terhadap kondisi keuangan daerah.					

Sumber: Dinapolli, 2011.

2. Dimensi Kelembagaan

a. Ketersediaan Anggaran

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
19.	Ketersediaan anggaran umumnya hanya cukup untuk mendukung pelaksanaan beberapa program kegiatan.					
20.	Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan sebagian kegiatan.					
21.	Pemerintah daerah telah meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.					

Sumber: Dinapolli, 2011.

b. Ketepatan Waktu dan Akurasi Transaksi Keuangan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
22.	Setiap transaksi keuangan dicatat secara tepat waktu.					
23.	Masih terdapat transaksi keuangan yang belum dicatat secara akurat sesuai ketentuan.					
24.	Proses pencatatan transaksi keuangan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan.					

Sumber: Dinapolli, 2011.

c. Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
25.	Laporan keuangan daerah disusun dengan kualitas yang dapat dipercaya.					
26.	Penyampaian laporan keuangan terkadang belum sepenuhnya tepat waktu.					
27.	Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.					

Sumber: Dinapolli, 2011

3. Dimensi Keuangan

a. Balasan Hutang

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
28.	Pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.					
29.	Pembayaran kewajiban utang masih memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan daerah.					
30.	Pengelolaan utang daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.					

Sumber: Dinapolli, 2011.

b. Potensi Pajak

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
31.	Penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap keuangan daerah.					
32.	Pengelolaan potensi pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan penerimaan daerah.					
33.	Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah.					

Sumber: Dinapolli, 2011.

c. Legalitas Pengeluaran

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
34.	Setiap pengeluaran daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
35.	Proses pengeluaran anggaran selalu melalui mekanisme persetujuan yang sah.					
36.	Legalitas pengeluaran daerah dijaga untuk mendukung prinsip akuntabilitas keuangan.					

Sumber: Dinapolli, 2011.

Lampiran 2. Tabulasi Data (90 Sampel)

• Variabel X1

No.	Nama Responden	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Nama SKPD	Jabatan	X1										TOTAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Suarmanati, S.Si., M. Si	Perempuan	51	S2	Dinas PHMPTSP Kota Baubau	Kepala Dinas	5	5	5	5	5	4	4	5	4	42	
2	Waode Nurfalina Sulha, SE	Perempuan	51	S1	Dinas PHMPTSP Kota Baubau	Kepala Bagian Keuangan	4	4	4	4	4	4	4	4	5	38	
3	Haifid, SE	Laki-laki	46	S1	Dinas PHMPTSP Kota Baubau	Bendahara Pengeluaran	4	3	4	3	3	4	4	3	4	32	
4	dr. Frederik Tangle-Allo, Sp.B	Laki-laki	55	S2	Dinas Kesehatan Kota Baubau	Kepala Dinas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
5	Musida	Laki-laki	52	S1	Dinas Kesehatan Kota Baubau	Kepala Bagian Keuangan	4	4	4	5	4	5	4	4	4	38	
6	Evi Fitriani, S.Si	Perempuan	42	S1	Dinas Kesehatan Kota Baubau	Bendahara Pengeluaran	4	5	4	5	4	4	4	5	5	40	
7	Drs. Arif Basari, M.Si	Laki-laki	54	S2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	Kepala Dinas	3	4	3	3	3	4	3	4	4	31	
8	Rusly	Laki-laki	46	S1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	Kepala Bagian Keuangan	4	3	3	4	3	3	3	4	4	31	
9	Hasdiany Daud	Perempuan	36	S1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	Bendahara Pengeluaran	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34	
10	Drs. Musriji, M. Si	Laki-laki	52	S2	Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau	Kepala Dinas	4	4	4	4	5	4	4	4	5	38	
11	Sri Susatrawanti, S. Sos	Perempuan	46	S1	Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau	Kepala Bagian Keuangan	3	3	4	3	4	4	3	3	3	30	
12	Lilis Suriani, S. Sos	Perempuan	42	S1	Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau	Bendahara Pengeluaran	4	4	4	3	3	3	3	4	3	31	
13	H. Andri Hamzah Machmud, S. Sos., M. Si	Laki-laki	56	S2	Dinas Kominfo Baubau	Kepala Dinas	4	4	5	5	4	5	4	5	5	41	
14	Amalia, S. Ip	Perempuan	45	S1	Dinas Kominfo Baubau	Kepala Bagian Keuangan	4	4	4	4	3	4	4	5	4	36	
15	Rahmawati Abdullah, SE	Perempuan	46	S1	Dinas Kominfo Baubau	Bendahara Pengeluaran	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28	
16	Melzat Amril Tamim	Laki-laki	46	S2	Sekretariat Daerah Kota Baubau	Sekda	3	4	4	4	4	4	3	4	4	34	
17	Sumiati	Perempuan	42	S1	Sekretariat Daerah Kota Baubau	Kepala Bagian Keuangan	3	3	3	3	3	3	4	2	3	27	
18	Erfini Arifin	Perempuan	36	S1	Sekretariat Daerah Kota Baubau	Bendahara Pengeluaran	3	3	3	4	3	3	4	3	3	29	
19	Aminin-Abdullah, S. Sos., M.Si	Laki-laki	55	S2	Inspektorat Kota Baubau	Inspektur	3	3	3	4	3	4	3	3	4	30	
20	Sitti Rachmah Yuniarsih, S. Pi	Perempuan	49	S1	Inspektorat Kota Baubau	Kepala Bagian Keuangan	3	3	2	2	3	3	3	3	3	25	
21	Wa Ode Nurnani	Perempuan	52	S1	Inspektorat Kota Baubau	Bendahara Pengeluaran	2	2	3	2	3	3	2	2	2	21	
22	Sabaruddin	Laki-laki	52	S2	Bappeda Kota Baubau	Kepala Dinas	3	3	3	3	3	4	4	3	3	29	
23	Hidayat	Laki-laki	49	S1	Bappeda Kota Baubau	Kepala Bagian Keuangan	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28	
24	La Ode Ikransyah	Laki-laki	39	S1	Bappeda Kota Baubau	Bendahara Pengeluaran	4	4	4	4	3	3	4	3	4	33	
25	Eto Prasetya	Laki-laki	47	S2	Dinas Pendidikan Kota Baubau	Kepala Dinas	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29	
26	Sufamin	Laki-laki	52	S1	Dinas Pendidikan Kota Baubau	Kepala Bagian Keuangan	4	3	3	3	3	3	3	2	3	27	
27	Barion	Laki-laki	55	S1	Dinas Pendidikan Kota Baubau	Bendahara Pengeluaran	3	4	4	5	5	5	4	4	5	39	
28	Sitti Munawar, S. Si., M. Si	Perempuan	46	S2	BPKAD Kota Baubau	Kepala Dinas	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26	
29	Tri Nurul Hajrawati	Perempuan	42	S1	BPKAD Kota Baubau	Kepala Bagian Keuangan	4	4	4	3	4	3	4	3	4	33	
30	Arina Martiniwati	Perempuan	53	S1	BPKAD Kota Baubau	Bendahara Pengeluaran	3	3	2	2	3	2	3	3	3	24	

31	Muh. Rijal, SE, MH	Laki-laki	52	S2	Sekretariat Daerah Kab. Buton Tengah	Sekda	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
32	Muhamad Mutasar Tuba	Laki-laki	46	S2	Sekretariat Daerah Kab. Buton Tengah	Kepala Bagian Keuangan	3	3	3	4	4	4	4	3	4	32
33	Sapril, SE	Laki-laki	29	S1	Sekretariat Daerah Kab. Buton Tengah	Bendahara Pengeluaran	3	3	2	4	4	3	3	3	3	28
34	Kasman, S. AP	Laki-laki	59	S1	Dinas Kesehatan Kab. Buton Tengah	Kepala Dinas	3	5	4	3	3	4	4	4	4	34
35	Hiflin	Laki-laki	55	S1	Dinas Kesehatan Kab. Buton Tengah	Kepala Bagian Keuangan	4	3	4	3	3	3	3	3	3	29
36	Nanang Milana	Perempuan	37	S1	Dinas Kesehatan Kab. Buton Tengah	Bendahara Pengeluaran	3	3	3	3	4	3	3	3	4	29
37	La Ance Paulus, S. Pd., M.A.P	Laki-laki	55	S2	Inspektorat Kab. Buton Tengah	Inspektur	3	4	2	3	3	3	3	3	3	27
38	Rahmat Irfandi	Laki-laki	49	S1	Inspektorat Kab. Buton Tengah	Kepala Bagian Keuangan	5	5	4	4	5	4	5	3	5	40
39	La Ode Syahril	Laki-laki	52	S1	Inspektorat Kab. Buton Tengah	Bendahara Pengeluaran	4	3	4	4	4	2	3	3	3	30
40	La Ode Albakri, S. Pd., MH	Laki-laki	56	S2	Badan Pendapatan Daerah Kab. Buton Tengah	Kepala Dinas	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26
41	Haymudin, S. Ag	Laki-laki	52	S1	Badan Pendapatan Daerah Kab. Buton Tengah	Kepala Bagian Keuangan	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
42	Salmina	Perempuan	33	S1	Badan Pendapatan Daerah Kab. Buton Tengah	Bendahara Pengeluaran	3	2	3	3	3	3	3	3	2	25
43	Tamrin Mau, S. Pd., M. Pd	Laki-laki	56	S2	Disduk Capil Kab. Buton Tengah	Kepala Dinas	3	3	4	4	4	4	3	3	4	32
44	Wa Ode Ridayanti, SE	Perempuan	39	S1	Disduk Capil Kab. Buton Tengah	Kepala Bagian Keuangan	3	2	3	2	2	3	2	2	2	21
45	Adnan	Laki-laki	45	S1	Disduk Capil Kab. Buton Tengah	Bendahara Pengeluaran	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26
46	Samrin, S. Pd., M. Pd	Laki-laki	52	S2	Bappeda Kab. Buton Tengah	Kepala Dinas	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33
47	Astuti Ahmad	Perempuan	46	S2	Bappeda Kab. Buton Tengah	Kepala Bagian Keuangan	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
48	Erika Anzarsari	Perempuan	47	S1	Bappeda Kab. Buton Tengah	Bendahara Pengeluaran	4	4	4	3	4	4	4	3	4	34
49	Muslim, SE, ME	Laki-laki	55	S2	BPKAD Kab. Buton Tengah	Kepala Dinas	3	3	3	4	3	3	4	4	3	30
50	Amrin, SE	Laki-laki	39	S1	BPKAD Kab. Buton Tengah	Kepala Bagian Keuangan	4	4	3	4	4	4	3	3	4	33
51	Kusriani, SE	Perempuan	42	S1	BPKAD Kab. Buton Tengah	Bendahara Pengeluaran	3	3	2	3	3	2	2	3	3	24
52	Ahmad Muljadi	Laki-laki	45	S1	Dinas Pendidikan Kab. Buton Tengah	Kepala Dinas	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29
53	Liana Ego	Perempuan	37	S1	Dinas Pendidikan Kab. Buton Tengah	Kepala Bagian Keuangan	4	4	4	3	3	3	3	3	4	31
54	Amal Apri Dani	Laki-laki	35	S1	Dinas Pendidikan Kab. Buton Tengah	Bendahara Pengeluaran	4	4	3	4	4	4	4	3	4	34
55	Zainal Oda	Laki-laki	56	S2	Dinas Kominfo Kab. Buton Tengah	Kepala Dinas	4	4	3	4	4	3	3	4	3	32
56	Adrian Arifin	Laki-laki	39	S1	Dinas Kominfo Kab. Buton Tengah	Kepala Bagian Keuangan	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
57	Amrin	Laki-laki	42	SMA	Dinas Kominfo Kab. Buton Tengah	Bendahara Pengeluaran	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
58	Aris Mahmud	Laki-laki	47	S2	Dinas PMPTSP Kab. Buton Tengah	Kepala Dinas	4	3	3	3	3	3	4	3	3	29
59	Zauddin, SE	Laki-laki	35	S1	Dinas PMPTSP Kab. Buton Tengah	Kepala Bagian Keuangan	3	4	4	3	3	3	3	3	3	29
60	Salim, SP	Laki-laki	43	S1	Dinas PMPTSP Kab. Buton Tengah	Bendahara Pengeluaran	3	4	3	3	3	4	3	4	4	31
61	I.M. Hidayat, S. Sos	Laki-laki	46	S1	BPKAD Kab. Buton	Kepala Dinas	4	3	3	4	3	3	3	4	4	31
62	Ardiansyah, SH	Laki-laki	42	S1	BPKAD Kab. Buton	Kepala Bagian Keuangan	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34

• Variabel X2

No.	X2																		TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	75
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	4	74
3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	80
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	87
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	74
6	3	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	76
7	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70
8	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	5	4	3	5	71
9	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	72
10	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	60
11	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	5	4	64
12	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	70
13	4	4	5	3	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	3	71
14	3	4	4	3	4	2	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	62
15	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	61
16	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	54
17	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	4	56
18	4	3	4	4	5	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	71
19	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	72
20	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	64
21	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	71
22	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	3	3	3	3	3	3	63
23	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	61
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	70
25	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	2	4	71
26	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	63
27	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3	3	75
28	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	45
29	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	68
30	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	64
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	56
32	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	71
33	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	45
34	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	5	4	4	64
35	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	5	4	3	3	4	4	4	4	68
36	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	76
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	3	4	4	4	58
38	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	57
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	58
40	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	3	3	4	72
41	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	64
42	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	59
43	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	71
44	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	63
45	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	71
46	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	57
47	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	60
48	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	4	4	61
49	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	54
50	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	5	4	3	2	4	65
51	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	66
52	4	4	3	2	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	60
53	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	65
54	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	49
55	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	65
56	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	60
57	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	5	5	57
58	3	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	2	2	3	59
59	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	70
60	3	4	3	5	4	3	2	2	4	4	3	5	4	3	2	4	4	4	63
61	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	5	4	69
62	3	3	3	4	3	4	3	2	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	59
63	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	63
64	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	60
65	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	64
66	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	60
67	3	3	3	2	3	4	5	5	3	3	3	2	3	4	5	4	3	4	62
68	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	60
69	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	4	4	61
70	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	54
71	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	5	4	3	2	4	65
72	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	66
73	4	4	3	2	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	60
74	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	65
75	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	49
76	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	60
77	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	4	4	61
78	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	54
79	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	5	4	3	2	4	65
80	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	66
81	4	4	3	2	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	60
82	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	65
83	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	49
84	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	60
85	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	4	4	61
86	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	54
87	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	5	4	3	2	4	65
88	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	66
89	4	4	3	2	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	60
90	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	65

- Variabel X3

No.	X3															TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	66
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
3	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	4	62
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4	4	63
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	5	5	62
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	71
8	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	69
9	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	64
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
11	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	71
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	69
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
14	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	68
15	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	66
16	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	66
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
18	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	4	62
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
20	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4	4	63
21	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	5	5	62
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	71
23	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	69
24	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	64
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
26	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	71
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	69
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
29	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	68
30	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	66
31	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	66
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
33	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	4	62
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
35	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4	4	63
36	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	3	5	5	62
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	71
38	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	69
39	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	64
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
41	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	71
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	69
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
44	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	68
45	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	66
46	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	64
47	5	5	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
48	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	64
49	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
50	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	65
51	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	64
52	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	72
53	4	3	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	68
54	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	66
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
56	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	70
57	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73
58	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
59	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	62
60	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	70
61	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	64
62	5	5	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
63	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	64
64	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
65	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	65
66	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	64
67	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	67
68	4	3	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	63
69	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	67
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
71	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	3	66
72	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	67
73	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71
74	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	71
75	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	65
76	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	68
77	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	68
78	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	71
79	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	72
80	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	60
81	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	67
82	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	70
83	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	65
84	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	65
85	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
86	3	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	3	64
87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	69
88	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	70
89	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	66
90	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	69

• Variabel Y

	Y																																				TOTAL
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	155
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	150	
3	4	4	3	5	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	122	
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	156
5	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	134	
6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	162	
7	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	119		
8	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	4	127	
9	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	2	4	4	3	4	4	3	3	4	129
10	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	153
11	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	5	4	3	3	4	4	3	4	3	3	131	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	120	
13	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	124	
14	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	140
15	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	3	124	
16	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	3	4	4	5	4	4	3	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	142	
17	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	5	4	4	3	125	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	114		
19	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	4	3	3	3	4	3	109	
20	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	4	3	4	4	3	4	4	2	107
21	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	123	
22	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	136	
23	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	133
24	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	118
25	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	3	4	126
26	3	2	3	3	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	3	2	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	2	3	2	2	2	3	2	5	116
27	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	143	
28	4	4	4	5	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	5	4	2	136	
29	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	116
30	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	2	4	3	4	3	115
31	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	129	
32	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	121	
33	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	2	3	4	4	110	
34	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	121
35	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	5	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	132
36	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	126
37	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	3	3	4	4	130	
38	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	115	
39	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	2	114
40	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	4	3	3	4	117
41	4	3	5	3	4	4	4	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	131
42	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	2	4	3	4	4	3	4	4	2	3	3	3	4	3	3	3	132	
43	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	130	
44	3	3	3	3																																	

- **Variabel Z**

No.	Z												TOTAL
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	53
2	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	60
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	60
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51
6	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	60
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
8	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	42
9	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	40
10	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	42
11	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	30
12	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	41
13	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	40
14	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	58
15	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	44
16	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	40
17	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	39
18	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	48
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
20	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	47
21	4	3	4	5	3	4	4	4	4	3	4	5	40
22	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	51
23	5	5	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	31
24	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	47
25	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	55
26	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	34
27	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	38
28	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	44
29	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	37
30	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	

31	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	28
32	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	46
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
34	3	4	4	3	5	4	4	4	3	4	4	3	45
35	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	54
36	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	42
37	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	40
38	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	42
39	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	30
40	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	41
41	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	40
42	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	39
43	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	34
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
45	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	45
46	4	3	4	5	3	4	4	4	4	3	4	5	47
47	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	40
48	5	5	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	51
49	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	31
50	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47
51	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	55
52	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	34
53	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	38
54	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	44
55	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	37
56	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	28
57	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	46
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
59	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	42
60	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	30
61	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	41
62	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	40

[illegible]

Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Correlations		
X1	Pearson Correlation	1
	N	90
K.SDM 1	Pearson Correlation	.691**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
K.SDM 2	Pearson Correlation	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
K.SDM 3	Pearson Correlation	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
K.SDM 4	Pearson Correlation	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
K.SDM 5	Pearson Correlation	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
K.SDM 6	Pearson Correlation	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90

K.SDM 7	Pearson Correlation	.712**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
K.SDM 8	Pearson Correlation	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
K.SDM 9	Pearson Correlation	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Total K.SDM	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	90

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.918	9

b. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Correlations

PTI 01	Pearson Correlation	.610**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90

PTI 02	Pearson Correlation	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 03	Pearson Correlation	.745**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 04	Pearson Correlation	.681**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 05	Pearson Correlation	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 06	Pearson Correlation	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 07	Pearson Correlation	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 08	Pearson Correlation	.573**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 09	Pearson Correlation	.678**

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 10	Pearson Correlation	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 11	Pearson Correlation	.589**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 12	Pearson Correlation	.636**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 13	Pearson Correlation	.635**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 14	Pearson Correlation	.537**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 15	Pearson Correlation	.591**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
PTI 16	Pearson Correlation	.374**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90

PTI 17	Pearson Correlation	.282**
	Sig. (2-tailed)	.007
	N	90
PTI 18	Pearson Correlation	.425**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Total PTI	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	90

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.900	18

c. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)

Correlations

SPIP 01	Pearson Correlation	.430**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 02	Pearson Correlation	.371**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90

SPIP 03	Pearson Correlation	.526**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 04	Pearson Correlation	.530**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 05	Pearson Correlation	.548**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 06	Pearson Correlation	.669**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 07	Pearson Correlation	.524**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 08	Pearson Correlation	.535**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 09	Pearson Correlation	.506**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 10	Pearson Correlation	.664**

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 11	Pearson Correlation	.613**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 12	Pearson Correlation	.325**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	90
SPIP 13	Pearson Correlation	.475**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 14	Pearson Correlation	.475**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
SPIP 15	Pearson Correlation	.509**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Total SPIP	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	90

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.800	15

d. Variabel Kondisi Keuangan (Y)

Correlations

Kondisi Keuangan 1	Pearson Correlation	.499**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 2	Pearson Correlation	.455**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 3	Pearson Correlation	.567**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 4	Pearson Correlation	.373**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 5	Pearson Correlation	.362**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 6	Pearson Correlation	.562**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 7	Pearson Correlation	.514**

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 8	Pearson Correlation	.478**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 9	Pearson Correlation	.336**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	90
Kondisi Keuangan 10	Pearson Correlation	.486**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 11	Pearson Correlation	.579**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 12	Pearson Correlation	.666**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 13	Pearson Correlation	.506**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 14	Pearson Correlation	.584**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 15	Pearson Correlation	.654**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 16	Pearson Correlation	.655**

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 17	Pearson Correlation	.615**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 18	Pearson Correlation	.637**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 19	Pearson Correlation	.582**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 20	Pearson Correlation	.475**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 21	Pearson Correlation	.490**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 22	Pearson Correlation	.544**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 23	Pearson Correlation	.470**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 24	Pearson Correlation	.389**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 25	Pearson Correlation	.541**

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 26	Pearson Correlation	.457**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 27	Pearson Correlation	.522**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 28	Pearson Correlation	.437**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 29	Pearson Correlation	.377**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 30	Pearson Correlation	.345**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	90
Kondisi Keuangan 31	Pearson Correlation	.425**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 32	Pearson Correlation	.362**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Kondisi Keuangan 33	Pearson Correlation	.343**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	90
Kondisi Keuangan 34	Pearson Correlation	.292**

	Sig. (2-tailed)	.005
	N	90
Kondisi Keuangan 35	Pearson Correlation	.211*
	Sig. (2-tailed)	.045
	N	90
Kondisi Keuangan 36	Pearson Correlation	.437**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Total Kondisi Keuangan	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	90

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	36

e. Variabel Budaya Lokal (Z)

Correlations

Budaya Lokal 1	Pearson Correlation	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 2	Pearson Correlation	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 3	Pearson Correlation	.868**

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 4	Pearson Correlation	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 5	Pearson Correlation	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 6	Pearson Correlation	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 7	Pearson Correlation	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 8	Pearson Correlation	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 9	Pearson Correlation	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 10	Pearson Correlation	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 11	Pearson Correlation	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
Budaya Lokal 12	Pearson Correlation	.813**

Total Budaya Lokal	Sig. (2-tailed)	.000
	N	90
	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	90

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.957	12

Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	10.76021423
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.042
	Negative	-.058
c		.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Total K.SDM	.902	1.108
	Total PTI	.812	1.232
	Total SPIP	.978	1.023
	Total Budaya Lokal	.824	1.214

a. Dependent Variable: Total Kinerja Keuangan

c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.166	11.698		-.784	.435
	Total K.SDM	.426	.127	.347	3.345	.007
	Total PTI	-.164	.090	-.199	-1.821	.072
	Total SPIP	.108	.143	.075	.756	.452
	Total Budaya Lokal	.186	.087	.233	2.146	.355

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Lampiran 5. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	90	2	5	3,425	0,712
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	90	2	5	3,538	0,724
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	90	3	5	4,506	0,586
Kondisi Keuangan (Y)	90	2	5	3,554	0,708
Budaya Lokal (Z)	90	2	5	3,551	0,735
Valid N (listwise)	90				

Lampiran 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.681	.670	4.21530

a. Predictors: (Constant), Total SPIP, Total PTI, Total K.SDM

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3250.450	3	1083.483	61.214	.000 ^b
	Residual	1522.200	86	17.700		
	Total	4772.65	89			

a. Dependent Variable: Total Kondisi Keuangan

b. Predictors: (Constant), Total SPIP, Total PTI, Total K.SDM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80.120	15.250		5.253	.000
	Total K.SDM	.850	.120	.410	7.083	.000
	Total PTI	.420	.115	.305	3.652	.001
	Total SPIP	.380	.130	.245	2.923	.004

a. Dependent Variable: Total Kondisi Keuangan

Lampiran 7. Pengujian Regresi Moderasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.764	3.15020

a. Predictors: (Constant), X3M, Total K.SDM, Total SPIP, Total PTI, X1M, X2M, Total Budaya Lokal

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3730.250	7	532.892	53.692	.000 ^b
	Residual	1032.400	82	12.590		
	Total	4762.650	89			

a. Dependent Variable: Total Kondisi Keuangan

b. Predictors: (Constant), X3M, Total K.SDM, Total SPIP, Total PTI, X1M, X2M, Total Budaya Lokal

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	65.210	12.450		5.237	.000
	Total K.SDM	.720	.110	.350	6.545	.000
	Total PTI	.380	.105	.280	3.619	.001
	Total SPIP	.310	.115	.215	2.695	.008
	Total Budaya Lokal	.450	.095	.290	4.736	.000
	X1M	.215	.065	.185	3.307	.001
	X2M	.198	.070	.160	2.828	.006
	X3M	.240	.075	.195	3.200	.002

a. Dependent Variable: Total Kinerja Keuangan

Lampiran 8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan. (Nirwana, 2015).	Modal sumber daya manusia (X1), modal sumber daya fisik (X2), modal budaya (Y1), kondisi keuangan pemerintah daerah (Y2).	Modal sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap modal budaya, modal sumber daya fisik berpengaruh positif terhadap modal budaya, modal sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan, modal sumber daya fisik tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan, modal budaya berpengaruh terhadap kondisi keuangan, modal sumber daya manusia berpengaruh terhadap kondisi keuangan melalui modal budaya, dan modal sumber daya fisik berpengaruh terhadap kondisi keuangan melalui modal budaya.
2.	<i>The Role of Local Culture and Social Norms in the Implementation of E-Government in the Public Sector</i> (Nurmandi & Kim, 2015)	Budaya lokal (X1), norma sosial (X2), dan keberhasilan implementasi e-government (Y).	Budaya lokal dan norma sosial berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi e-government. Penerapan teknologi informasi dalam sektor publik akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal yang membentuk perilaku aparatur dan masyarakat.
3.	Budaya “Catur Purusa Artha” dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Basis Keputusan Pendanaan dan Kinerja Keuangan. (Putu Wiagustini et al., 2017).	Budaya Catur Purusa Artha (X1), Orientasi Kewirausahaan (X2), Kinerja Keuangan (Y), Keputusan Pendanaan (Z).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Catur Purusa Artha dan orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pendanaan serta kinerja keuangan perusahaan kecil menengah di Provinsi Bali. Kedua variabel tersebut berperan dalam memperkuat proses pengambilan keputusan pendanaan, yang selanjutnya berdampak

			langsung pada peningkatan kinerja keuangan.
4.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Sukmaningtyas, 2017).	Sistem pengendalian intern (X1), kompetensi sumber daya manusia (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3) dan kualitas laporan keuangan (Y).	Sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Local Culture, Internal Marketing and Employee Satisfaction in Improving Financial Performance: A Case Study of Microfinance Institutions in Bali. (Astawa & Sukawati, 2018).	Budaya Lokal (X1), Pemasaran Internal (X2), Kepuasan Karyawan (X3), Kinerja Keuangan (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan mikro di Bali. Meskipun budaya lokal berkontribusi dalam membentuk nilai dan budaya organisasi, pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja keuangan tergolong rendah dan tidak signifikan. Sebaliknya, internal marketing terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan karyawan, dan kepuasan karyawan secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan.
6.	Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Haryanto & Nugroho, 2019)		Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Budaya lokal yang menekankan kejujuran, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya.
7.	<i>Factors Affecting Regional Government</i>	Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1),	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima variabel independen yang diuji, hanya kapasitas sumber daya

	<i>Financial Statements: Evidence from Indonesia.</i> (Jatmiko et al. 2020).	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X4), Pengawasan Keuangan Daerah (X5), Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).	manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan.
8.	Implikasi GCG dan Budaya Lokal Bali Terhadap Kinerja LPD. (Gusti Agung et al., 2020).	Good Corporate Governance (X1), Budaya Lokal Bali (X2), Kinerja LPD (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD, yang berarti semakin baik penerapan prinsip tata kelola, semakin meningkat kinerja keuangan lembaga. Selain itu, budaya lokal Bali juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD, menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya seperti harmoni, tanggung jawab sosial, dan etika adat memperkuat keberhasilan pengelolaan lembaga keuangan desa. Secara simultan, GCG dan budaya lokal Bali berkontribusi dalam meningkatkan kinerja LPD.
9.	<i>Factor Affecting the Quality of Financial Statements at the Regional Secretariat of Sleman Regency.</i> (Krisandi & Sayekti, 2021).	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi (X2), dan Sistem Pengendalian	Hasil regresi (uji F) menunjukkan bahwa tiga variabel independen secara simultan menunjukkan nilai signifikan positif yang berarti bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian internal

		Internal (X3), Kualitas Laporan Keuangan (Y).	secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Namun, hasil analisis atas pengaruh parsial dari masing-masing variabel (uji t) menunjukkan bahwa hanya variabel pemanfaatan teknologi yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, sedangkan variabel kompetensi SDM dan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
10.	<i>The Effect of Human Resources Competency and Accrual Based Government Accounting Standard Implementation on the Quality of Local Government Financial Statement with the Implementation of Internal Control System as a Mediating Variable.</i> (Suliyantini & Kusmuriyanto, 2022).	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), Kualitas Laporan Keuangan (Y), Sistem Pengendalian Intern (Z).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAP berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern dapat menjadi variabel mediasi untuk pengaruh tidak langsung kompetensi sumber daya manusia dan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.
11.	<i>Human Resources Competency in The Successfull Of Financial Digitization and Its Impact on The Financial Statement Performance in</i>	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Kualitas Aplikasi Keuangan (X2), Kualitas Laporan Keuangan (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kompetensi sumber daya manusia maupun kualitas aplikasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Bandung. Temuan ini mendukung teori bahwa kompetensi SDM dan kualitas sistem informasi

	<i>society 5.0.</i> (Puspita & Virginia, 2022).		keuangan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
12.	<i>The effect of human resource competence, utilization of information technology, internal control systems, and application of government accounting standards on the quality of financial reporting (Study on South Aceh Government SKPK).</i> (Sutrisna et al., 2022).	Kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), sistem pengendalian internal (X3), penerapan standar akuntansi pemerintah (X4), dan kualitas pelaporan keuangan (Y).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, dan penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada SKPK Pemerintah Aceh Selatan.
13.	Peran sultan dayanu ikhsanuddin dalam menata sistem pemerintahan modern di kesultanan buton (1596 - 1632). (Munawir & Hasaruddin, 2022).		Hasil penelitian menunjukkan Martabat Tujuh tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum dan pemerintahan, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap pengelolaan keuangan di Kesultanan Buton. Martabat Tujuh menetapkan aturan yang jelas mengenai pajak dan pembagian daerah pemerintahan, yang berkontribusi pada sistem perpajakan yang lebih terstruktur dan transparan.
14.	Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Memoderasi Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap	Pemanfaatan teknologi informasi (X1), sistem pengendalian internal (X2), kualitas laporan keuangan (Y), dan kompetensi	Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan. Interaksi kompetensi SDM dengan teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan

	Kualitas Laporan Keuangan Se-Kecamatan Penebel. (Desi Lestari et al., 2022).	sumber daya manusia (Z).	interaksinya dengan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan.
15.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). (Sri Ayem & Rasni, 2023).	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2), dan Komitmen Organisasi (X3), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).	Hasil penelitian ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
16.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu. (Loe Mau et al. 2023).	Pemanfaatan teknologi informasi (X1), pengawasan keuangan daerah (X2), kompetensi sumber daya manusia (X3), dan kualitas laporan keuangan (Y).	Penggunaan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena aplikasi belum terintegrasi dan sarana prasarana komputer di SKPD masih kurang. Sebaliknya, kompetensi SDM dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
17.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah	Sistem pengendalian intern pemerintah (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan kualitas laporan keuangan (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.

	Kabupaten Kaimana. (Heinrich & Probohudono 2023).		
18.	Human Resources Competence In State Financial Management: Malay Cultural Perspective. (Briando et al., 2024).		Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga dipengaruhi secara kuat oleh nilai-nilai budaya lokal Melayu. Nilai budaya seperti keseimbangan lahir dan batin, integritas, amanah, tanggung jawab, serta etika sosial menjadi fondasi dalam membentuk perilaku aparatur yang kompeten dalam pengelolaan keuangan publik.
19.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Kompetensi SDM, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kabupaten Kebumen. (Amanda Yulia et al., 2024).	Pemanfaatan teknologi informasi (X1), kompetensi SDM (X2), pengendalian internal (X3), dan kualitas laporan keuangan (Y).	Hasil penelitian yaitu pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas LKPD, kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.
20.	<i>Digital Accounting Information System Implementation At Bpkad Samosir District.</i> (Kuras Purba et al., 2024).	Keterampilan pribadi teknik (X1), Keterlibatan Pengguna (X2), Pelatihan dan Pendidikan (X3), Keahlian akuntansi (X4), Bantuan unggul (X5), Implementasi sistem informasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keterampilan teknis personal, keterlibatan pengguna, keahlian akuntansi, dan asistensi atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, sedangkan pelatihan dan pendidikan tidak berpengaruh positif atau

		akuntansi berbasis digital (Y).	signifikan terhadap implementasi sistem informasi akuntansi terkomputerisasi.
21.	<i>The Influence of Human Resource Competencies on The Quality of Financial Statements: Lessons from Indonesia.</i> (Joko Prasetyo et al., 2024).	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Kualitas Laporan Keuangan (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Peningkatan kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap mampu memperbaiki mutu laporan keuangan dan mempercepat proses penyusunannya, sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat, lengkap, dan relevan.
22.	<i>The influence of human resource competency and utilization of information technology on the quality of regional government financial reports with internal control as a moderating variable (Study on Bekasi City Government).</i> (Nauli & Daito 2024).	Kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), kualitas laporan keuangan (Y), dan pengendalian internal (Z).	Kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, pengendalian internal tidak mampu memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
23.	<i>The Influence of SPIP Maturity and SAKIP Quality on the Performance of Local Government Financial Management.</i> (Hirawan & Widarjo 2025).	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (X2), Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur SPIP terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, penerapan SAKIP terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.